GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang :

a. bahwa hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara lestari;

b. bahwa sistem pengelolaan hutan dan perkebunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada norma hukum;

c. bahwa operasional kegiatan yang bergerak di sektor kehutanan dan perkebunan dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan perubahan terhadap ekosistem lingkungan;

d. bahwa dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan yang dapat menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, dipandang perlu melaksanakan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c dan d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembar Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa mengenai Perubahan Iklim (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 1973 Tentang Pengawasan atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1995 Tentang Perlindungan Tanaman;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan Tanaman;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 Tentang Pelaksana Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah B3;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biom Masa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4068);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tentang Perencanaan Kehutanan;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2007 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
26. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
27. Keputusan Presiden Nomor 117/P Tahun 2008 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, MM, M.Si sebagai Gubernur Kalimantan Timur dan Drs. H. Farid Wadjdy, M.Pd sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan 2008 - 2013;
28. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 / Menhut-II/2005 tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka pengembangan usaha Budidaya Perkebunan;
29. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Jenis Usaha atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
30. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
31. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2007 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2007 Tentang Rencana Kerja dan Rencana Kerja Tahunan dan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman industri dan Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman;
32. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39 / Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara pengenaan Sanksi Admnistrasi Terhadap Pemegang Ijin Pemanfaatan Hutan;
33. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 523/Kpts-II/1993 Tentang Pedoman Perlindungan Hutan di Areal Pengusahaan Hutan;
34. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak bergerak;
35. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 206/Kpts-II/1995 Tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan dan Pembuatan Hutan Tanaman
36. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 Tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
37. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 310/Kpts-II/1999 Tentang Pedoman Pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan;
38. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999 Tentang AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;

39. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
40. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4795/Kpts-II/2002 Tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
41. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 4796/Kpts-II/2002 Tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Alam Produksi Lestari pada Unit Pengelolaan;
42. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 Tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perijinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air Atau Sumber Air;
43. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL;
44. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 357/Kpts/Hk.350/5/2005 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan;
45. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 79 /Kpts-II / 2008 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilyah Propinsi Kalimantan Timur;
46. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 12 Tahun 1993 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
47. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Propinsi Kalimantan Timur Nomor 339 Tahun 1988 Tentang Baku Mutu Lingkungan di Kalimantan Timur;
48. Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Provinsi Kalimantan Timur Nomor 050/K.443/1999 Tentang Penetapan hasil Padu Serasi Antara RTRW dengan TGHK Provinsi Kalimantan Timur;
49. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri dan Usaha Lainnya Dalam Provinsi Kalimantan Timur.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor 03/Bapedal/09/1995 Tentang Persyaratan Tehnis Pengelolaan Limbah B 3;
2. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor 05/Bapedal/09/1995 Tentang Simbul dan Label Limbah B 3;
3. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Tehnis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak;
4. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor 105 Tahun 1997 Tentang Pedoman Pemantauan Pelaksanaan RKL dan RPL;
5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor 205 Tahun 1996 Tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara Sumber Tak Bergerak;
6. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Nomor Kep 01-05/Bapedal/09/1995 Tentang Tata Cara Penyimpanan, Pengumpulan, Pengolahan dan Penimbunan Limbah B3.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

Pasal 1

Pedoman Pelaksanaan dan Kriteria/Indikator Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan, Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri dan Perkebunan sebagaimana lampiran I, II, III, IV, V, VI, dan VII peraturan ini.

Pasal 2

Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan adalah sebagai salah satu upaya pengawasan dan pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup di Provinsi Kalimantan Timur.

Pasal 3

Pedoman sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 peraturan ini adalah merupakan panduan dalam memberikan Penilaian terhadap Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Kalimantan Timur.

Pasal 4

Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/UPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan yang telah melakukan kegiatan minimal 2 (dua) tahun wajib mengikuti Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan.

Pasal 5

Penilaian dalam rangka Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan ini dilakukan minimal 6 (enam) bulan sekali dan hasilnya dipublikasikan 1 (satu) tahun sekali oleh Gubernur Kalimantan Timur.

Pasal 6

Penilaian akan dilakukan oleh Tim Evaluasi yang di Koordinir oleh Bapedalda Provinsi Kalimantan Timur dengan melibatkan Dinas / Instansi Terkait, Perguruan Tinggi dan Unsur Pemerintah Kabupaten / Kota dimana kegiatan tersebut berada.

Pasal 7

Penilaian dalam rangka Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT) dan Perkebunan diwujudkan dalam bentuk sertifikat dan bendera peringkat, khusus bendera wajib dikibarkan oleh perusahaan yang memperolehnya.

Pasal 8

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) dan Perkebunan terhadap pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR

H. SYAIFUL TETENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 01

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK) TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Program Peringkat Kinerja (Proper) Hak Pengusahaan Hutan (HPH/IUPHHK)

1. **Aspek Perencanaan, meliputi :**
   - 1.1. Rencana Karya Pengusahaan Hutan/ Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKPH/RKUPHHK)
   - 1.2. Rencana Karya Lima Tahun (RKL)
   - 1.3. Rencana Karya Tahunan (RKT) / Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKTUPHHK)
   - 1.4. Pemetaan dan ketersediaan foto udara / citra landsat
   - 1.5. Tata batas dan penataan areal kerja / PAK
   - 1.6. Inventarisasi tegakan sebelum penebangan (ITSP)
   - 1.7. Inventarisasi hasil hutan non kayu
   - 1.8. Kesesuaian RKPH/RKUPHHK, RKL, RKTUPHHK dengan dokumen AMDAL

2. **Aspek Kelestarian Produksi, meliputi :**
   - **2.1. Pembangunan Jalan Hutan**
     - 2.1.1. Perencanaan
     - 2.1.2. Pembuatan Jalan Induk/ Utama dan Jalan Cabang
     - 2.1.3. Pembuatan Jembatan dan Gorong - Gorong
     - 2.1.4. Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu
   - **2.2. Teknik Penebangan**
   - **2.3. Pembuiatan TPN dan TPK**
   - **2.4. Kesesuaian volume tebangan dengan jatah produksi tahunan (JPT)**
   - **2.5. Kelestarian fungsi hutan**
     - 2.5.1. Persemaian
     - 2.5.2. Rehabilitasi TPK
     - 2.5.3. Bangunan Sipil Teknis
   - **2.6. Produksi**
     - 2.6.1. Laporan Hasil Penebangan
     - 2.6.2. Laporan Hasil Produksi
     - 2.6.3. Laporan Luas Tebangan Tahunan
     - 2.6.4. Peta Rehabilitasi Luas Tebangan
     - 2.6.5. Batas Blok Tebangan
     - 2.6.6. Penebangan diluar Blok
     - 2.6.7. Sistem Pengawasan oleh Perusahaan

3. Aspek Monitoring dan Evaluasi, meliputi :

3.1. Pelaksanaan Inventarisasi Tegakan Tinggal

3.2. Penerapan Silvikultur pada Inventarisasi Tegakan Tinggal

3.2.1. Pembebasan Tanaman

3.2.2. Jenis Tanaman dan Kapasitas Persemaian

3.2.3. Penelitian dan Pengembangan

3.2.4. Pengukuran Plot

3.2.5. Pelaporan Hasil Pengukuran

3.2.6. Tabel Volume Lokal

3.3. Identifikasi dan Seleksi Jenis Pohon Permudaan

3.3.1. Penentuan Pohon Inti

3.3.2. Jumlah Pancang

3.3.3. Jumlah Tiang

3.3.4. Penyimpanan Data

4. Aspek Konservasi dan Lingkungan, meliputi :

4.1. Konservasi Tanah

4.1.1. Penanaman Areal Kosong

4.1.2. Penanaman Kanan – Kiri Jalan

4.1.3. Rehabilitasi TPN

4.1.4. Penjarangan

4.2. Perlindungan Ekosistem

4.2.1. Pengelolaan Kawasan Lindung

4.2.2. Pengelolaan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah

4.2.3. Pengelolaan Kebun Benih 100 Ha / RKL

4.2.4. Perlindungan Daerah Penyangga

4.3. Perlindungan Flora dan Fauna

4.3.1. Inventarisasi Flora dan Fauna Langka

4.3.2. Pencegahan Perburuan Satwa

4.4. Pengendalian Kerusakan

4.4.1. Perangkat Pemantauan Erosi dan Sedimentasi

4.4.2. Tindakan Pencegahan Erosi

4.4.3. Pencegahan Pencurian dan Perambahan Hutan

4.4.4. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran

4.5. Perlindungan Hutan

4.5.1. Pembukaan Lahan Tanpa Izin

4.5.2. Pencegahan Penebangan Pohon Dilindungi

4.5.3. Pencegahan Penebangan Liar

4.5.4. Pencegahan Perambahan Hutan

4.6. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.6.1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup

4.6.2. Organisasi Unit Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)

4.6.3. SDM Pelaksana Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH)

4.6.4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan

4.6.5. Dokumen Lingkungan

4.6.6. Prosedure Tanggap Darurat

4.7. Pengelolaan Limbah B3

4.7.1. SOP Pengelolaan Limbah B3

4.7.2. Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3

4.7.3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3

4.7.4. Penyerahan dan Pemanfaatan Limbah B3

4.8. Pengelolaan Workshop dan Tempat Penyimpanan BBM

4.8.1. Pengelolaan Workshop

4.8.2. SOP Workshop

4.8.3. Tempat Penyimpanan BBM

4.9. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan

4.9.1. Ekolabel

4.9.2. ISO 14001

4.9.3. Sertifikasi PHPL

4.9.4. Audit. Lingkungan

5. Aspek Sosial Ekonomi, meliputi :

5.1. Ketanagakerjaan

5.2. Keselamatan Kerja

5.3. Pembangunan Kemasyarakatan

5.3.1. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan

5.3.2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat

5.3.3. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat

5.3.4. Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan

5.3.5. Pembangunan Infrastruktur

5.3.6. Penyelesaian Konflik Sosial dengan Masyarakat

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI/IUPHHK-HT) TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Program Peringkat Kinerja (Proper) Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI/IUPHHK-HT)

1. **Aspek Perencanaan, meliputi :**
   - 1.1. **Penyusunan Rencana**, berupa studi kelayakan, Rencana Karja Pengusahaan HTI (RKP-HTI), Rencana Karya Tahunan HTI (RKT-HTI).
   - 1.2. **Penataan Hutan**, yaitu pembuatan tata batas unit HTI, pembentukan bagian unit, pembagian blok / petak dan risalah petak.
   - 1.3. **Pembukaan Wilayah Hutan**, berupa penatagunaan lahan hutan, penetapan kelas kesesuaian lahan, potensi produksi masing-masing kelas lahan pada akhir daur, sistem site index setiap jenis tanaman, potensi produksi masing-masing site index pada akhir daur, ketersediaan data analisa jenis tanah/peta tanah, ketersediaan peta jenis tanaman HTI, ketersediaan volume produksi setiap jenis tanaman pada masing-masing areal HTI, prasarana jalan utama dan jalan cabang dan pembuatan dan pemasangan rambu-rambu.

2. **Aspek Pengorganisasian, meliputi :**
   - 2.1. **Struktur Organisasi Unit HTI**
   - 2.2. **Uraian Tugas / Tata Kerja**
   - 2.3. **Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan**
   - 2.4. **Pengembangan Kemampuan dan Karir Tenaga Teknis Kehutanan**

3. **Aspek Pelaksana & Pengawasan, meliputi :**
   - 3.1. **Pelaksanaan :**
     - 3.1.1. Pengadaan benih, terdiri dari :
       Asal benih, pembangunan sumber benih, penyimpanan benih, kualitas benih.
     - 3.1.2. Pengadaan bibit, terdiri dari :
       Asal bibit, persemaian, SOP persemaian, kualitas bibit, administrasi persemaian.
     - 3.1.3. Pembuatan tanaman, terdiri dari :
       1. Penyiapan lahan, meliputi :pembersihan lapangan, pengolahan tanah, SOP pengolahan tanah, pengawetan tanah.
       2. Penanaman, meliputi : realisasi tanaman, prosentase tumbuh, kualitas tanaman, pengaturan jarak, administrasi tanaman.
       3. Pemeliharaan tanaman, meliputi : intensitas pemeliharaan tanaman, penyiangan, pendangiran, penyulaman, pemupukan.
       4. Sekat bakar, meliputi : pembuatan sekat bakar dan jenis sekat bakar.

     3.1.4. Pemeliharaan tegakan, terdiri dari :
       1. Pemangkasan cabang, meliputi : realisasi pemangkasan, dan kualitas pemangkasan.
       2. Penjarangan, meliputi : realisasi penjarangan dan kualitas penjarangan.
       3. Administrasi pemeliharaan tegakan.

3.1.5. Pengadaan sarana dan prasarana, terdiri dari :
1. Pondok kerja, meliputi : pembuatan pondok kerja dan kualitas pondok kerja.
2. Base camp, meliputi : sarana base camp, tata ruang base camp, sarana perkantoran, air, perumahan karyawan, sarana ibadah, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana bersih, sarana olah raga, sarana rekreasi, dan sarana koperasi.
3. Peralatan/ perlengkapan, meliputi : peralatan kantor, peralatan lapangan/ survey, peralatan berat, dan peralatan perbengkelan.
4. Sarana transportasi, meliputi :angkutan tenaga kerja, dan angkutan barang.
5. Administrasi sarana dan prasarana, meliputi : administrasi rencana dan realisasi pengadaan sarana dan prasarana dan administrasi dan realisasi pemeliharaan saranan dan prasarana.

3.1.6. Penelitian dan pengembangan, terdiri dari :
Kegiatan penelitian dan pengembangan, uji coba tanaman, uji coba pemuliaan tanaman, penelitian silvikultur, penelitian tanah, penelitian penanaman, penelitian sosial ekonomi kehutanan, manajemen, hutan kemasyarakatan dan organisasi penelitian.

3.2. Pengawasan :
3.2.1. Pengawasan administrasi, terdiri dari :
Laporan ketenagaan dan laporan keuangan.
3.2.2. Pengawasan teknis, terdiri dari :
Laporan kemajuan pekerjaan, pemeriksaan fisik, organisasi pengawasan dan SOP pengawasan intern.

4. Aspek Konservasi dan Lingkungan, meliputi :
4.1. **Perlindungan Hutan**
4.2. **Perlindungan Ekosistem, yaitu :**
4.2.1. Pengelolaan kawasan lindung, terdiri dari :
Organisasi pengelola dan rencana kerja & anggaran.
4.2.2. Pengelola sempadan sungai, terdiri dari :
Tata batas, ketersediaan papan peringatan dan pengkayaan.
4.2.3. Pengelolaan sempadan danau/waduk/situ, terdiri dari :
Tata batas, ketersediaan papan peringatan dan pengkayaan.
4.2.4. Pengelolaan sempadan mata air, terdiri dari :
Tata batas, ketersediaan papan peringatan dan pengkayaan.
4.2.5. Pengelolaan areal kawasan perlindungan plasma nutfah (KPPN), terdiri dari :
Tata batas, penetapan & pengukuhan kawasan dan rencana kerja & anggaran.
4.3. **Perlindungan Flora dan Fauna, yaitu :**
4.3.1. Inventarisasi flora dan fauna langka/dilindungi.
4.3.2. Usaha pencegahan perburuan, terdiri dari :
Gambar satwa yang dilindungi dan papan larangan berburu.
4.3.3. Koridor satwa/petak pengungsian satwa.
4.3.4. Areal kelerengan > 40 %.
4.4. **Pengendalian kerusakan, yaitu :**
4.4.1. Perangkat pemantauan erosi/sedimentasi (SPAS/pengukur manual).
4.4.2. Sistem pencegahan erosi dan sedimentasi.
4.4.3. Pelaporan hasil pencatatan dan evaluasi.
4.4.4. Tindakan pencegahan erosi, terdiri dari :
Plot pemantauan erosi, penanaman cover crop pada areal tebing dan rintangan erosi.
4.4.5. Pengendalian hama dan penyakit, terdiri dari :
SOP pengendalian hama dan penyakit, unit khusus yang menangani hama & penyakit dan sarana & prasarana pengendalian hama dan penyakit.

4.4.6. Pencegahan pencurian dan perambahan kawasan, terdiri dari :
SOP pencegahan pencurian dan perambahan kawasan, unit khusus pengamanan hutan, perlengkapan keamanan, kegiatan patroli & penyuluhan kepada masyarakat, penyelesaian konflik dan SOP penanganan konflik lahan.

4.4.7. Pencegahan dan pengendalian kebakaran, terdiri dari :
SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran, unit khusus pengendalian kebakaran, rencana kerja anggaran, ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan, ketersediaan early warning sistem, stasiun pengamat iklim, upaya preventif pengendalian kebakaran hutan, yang meliputi ketersediaan papan peringatan/himbauan dan kegiatan penyuluhan, sosialisasi & pembinaan kepada masyarakat, kejadian kebakaran dalam satu tahun terakihir dan perlindungan flora dan fauna.

4.5. **Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu :**

4.5.1. Kebijakan pengelolaan lingkungan hidup.

4.5.2. Organisasi Unit PLH.

4.5.3. SDM pelaksana PLH.

4.5.4. Anggaran pengelolaan lingkungan.

4.5.5. Dokumen AMDAL, terdiri dari :
Dokumen AMDAL, UKL/UPL, pelaksanaan pengelolaan lingkungan, pelaksanaan Pemantauan lingkungan, kesesuaian antara RKL & RPL, SOP pemantauan dan pengelolaan lingkungan dan prosedure tanggap darurat.

4.5.6. Pengelolaan Limbah B3, terdiri dari :
SOP pengelolaan limbah B3, tempat penyimpanan sementara limbah B3, izin penyimpanan sementara limbah B3 dan penyerahan & pemanfaatan limbah B3.

4.5.7. Pengelolaan workshop dan tempat penyimpanan BBM, terdiri dari :
Pengelolaan workshop, SOP workshop dan tempat penyimpanan BBM.

4.5.8. Sertifikasi pengelolaan lingkungan, terdiri dari :
Ekolabel, ISO 14001, sertifikasi pengelolaan lingkungan lainnya dan audit lingkungan.

4.5.9. Dampak lingkungan, terdiri dari :
Erosi dan banjir.

5. Aspek Sosial Ekonomi, meliputi :

5.1. Penyerapan Tenaga Lokal & Perluasan Kesempatan Kerja.

5.2. Kebijakan dan Program Pengembangan Kemasyarakatan.

5.3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat.

5.4. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat.

5.5. Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan.

5.6. Pembangunan Infrastruktur.

5.7. Konflik Sosial dengan Masyarakat.

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Aspek-Aspek Yang Dinilai Dalam Program Peringkat Kinerja (Proper) Perusahaan Perkebunan

1. **Aspek Manajemen, meliputi :**
   - 1.1. Perencanaan Tahunan Perusahaan
   - 1.2. Perencanaan 5 Tahun Perusahaan
   - 1.3. Tenaga Kerja
   - 1.4. Pelaporan

2. **Aspek Pelaksanaan, meliputi :**
   - 2.1. Pemanfaatan Lahan
   - 2.2. Pemeliharaan Tanaman
     - 2.2.1. Pemupukan
     - 2.2.2. Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma
     - 2.2.3. Teknologi Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma

3. **Aspek Sosial, Pengabdian dan Lingkungan, meliputi :**
   - **3.1. Aspek Sosial**
     - 3.1.1. Jaminan Sosial
       - 3.1.1.1. Sistem Pengupahan
       - 3.1.1.2. Keselamatan Kerja
     - 3.1.2. Fasilitas Sosial Dilingkungan Kebun
       - 3.1.2.1. Pengadaan / Pembangunan Fasilitas Kesehatan
       - 3.1.2.2. Pengadaan / Pembangunan Fasilitas Pendidikan
       - 3.1.2.3. Pembangunan Sarana Ibadah
       - 3.1.2.4. Pengadaan / Pembangunan Fasilitas Olah Raga dan Hiburan
   - **3.2. Aspek Pengabdian Pada Masyarakat**
     - 3.2.1. Peningkatan Keterampilan dan Pelatihan
     - 3.2.2. Pembelian, Pemasaran Hasil Produksi Milik Masyarakat
     - 3.2.3. Penyediaan Bibit / Benih Unggul / Kebun Plasma Untuk Masyarakat
     - 3.2.4. Pembangunan Sarana Jalan
     - 3.2.5. Pembangunan Sarana Ibadah
     - 3.2.6. Pemberian Beasiswa
     - 3.2.7. Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
   - **3.3. Lingkungan**
     - 3.3.1. Organisasi Khusus Pemantau IPAL
     - 3.3.2. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
     - 3.3.3. Dokumen AMDAL
     - 3.3.4. Konservasi Tanah dan Air
       - 3.3.4.1. Terasiring
       - 3.3.4.2. Penganekaragaman Tanaman
     - 3.3.5. Pengendalian Kebakaran
       - 3.3.5.1. Petugas Khusus
       - 3.3.5.2. Peralatan Pengendalian dan Pencegahan Kebakaran
       - 3.3.5.3. Pemantauan
       - 3.3.5.4. Ketersediaan Sumber Air / Embung Air
       - 3.3.5.5. Peralatan Penunjang (Sarana Komunikasi)
       - 3.3.5.6. Penyelesaian Konflik / Kasus Lingkungan

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Nama	
H. TUPARMAN	KEPALA BAPEDALDA
H. SOFYAN HELMI	KARO HUKUM
H. AMBRANSYAH MUKRIE	PLH. ASS. I
H. SYAIFUL TETENG	SEKDA
H. FARID WADJDY	WAGUB

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK-HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR / KRITERIA PENILAIAN LAPANGAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH)

A. DATA UMUM

1. Nama HPH : .....
2. SK HPH : Nomor ....
   Tanggal .....
3. FA :
4. Alamat/Telp. Kantor :
   - Pusat :
   - Cabang :
5. Lokasi :
   - Adm. Pemerintah :
   - Adm. Kehutanan :
   - Kelompok Hutan :
   - DAS/Sub DAS :
6. Batas Areal Kerja :
   - Sebelah Utara :
   - Sebelah Barat :
   - Sebelah Selatan :
   - Sebelah Timur :
7. Luas : .... Ha
8. Status Kawasan
   - Hutan Konservasi : .... Ha
   - Hutan Produksi : .... Ha
   - Hutan Produksi Terbatas : .... Ha
9. Tipe Vegetasi Hutan : Mangrove/Rawa/Gambut/Kerangas/Hutan Hujan Dataran Rendah/Hutan Hujan Bukit/Hutan Musim
10. Tahun Mulai Pembalakan
    - Trial cutting :
    - Reguler :
    - Perpanjangan :

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
1. PERENCANAAN			
1. 1. RENCANA KARYA PENGUSAHAAN HUTAN (RKPH)			
1. 1. 1. Penyusunan			
a Ada dan telah disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang	5	1	1
b Ada, namun belum disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang	3	1	0,6
c Ada,namun belum selesai (masih dalam proses penyelesaian)	2	1	0,4
d Tidak Ada	0	1	0
1. 1. 2. Dasar Penyusunan			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5
1. 1. 3. Kesesuaian dengan Amdal			
a Sangat sesuai	5	1	1
b Sesuai	3	1	0,6
c Kurang sesuai	2	1	0,4
d Tidak sesuai	0	1	0
1. 2. RENCANA KARYA LIMA TAHUN (RKL)			
1. 2. 1. Penyusunan			
a Ada dan telah disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang	5	1	1
b Ada, namun belum disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang	3	1	0,6
c Ada,namun belum selesai (masih dalam proses penyelesaian)	2	1	0,4
d Tidak Ada	0	1	0
1. 2. 2. Dasar Penyusunan			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5
1. 2. 3. Kesesuaian dengan Amdal			
a Sangat sesuai	5	1	1
b Sesuai	3	1	0,6
c Kurang sesuai	2	1	0,4
d Tidak sesuai	0	1	0
1. 3. RENCANA KARYA TAHUNAN (RKT)			
1. 3. 1. Penyusunan			
a Ada dan telah disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang	5	1	1
b Ada, namun belum disahkan oleh instansi/pejabat yang berwenang	3	1	0,6
c Ada,namun belum selesai (masih dalam proses penyelesaian)	2	1	0,4
d Tidak Ada	0	1	0

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
1. 3. 2. Dasar Penyusunan			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5
1. 3. 3. Kesesuaian dengan Amdal			
a Sangat sesuai	5	1	1
b Sesuai	3	1	0,6
c Kurang sesuai	2	1	0,4
d Tidak sesuai	0	1	0
1. 4. PEMETAAN DAN KETERSEDIAAN FOTO UDARA / CITRA LANDSAT			
1. 4. 1. Penataan Areal Kerja / PWH			
a Sudah dilakukan	5	1	1
b Sedang dilakukan	3	1	0,6
c Tidak dilakukan	0	1	0
1. 4. 2. Cara pembuatan			
a Survey	3	0,5	0,3
b Peta Topografi	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b dan c	5	0,5	0,5
1. 4. 3. Ketersediaan dasar pemetaan			
a Citra Landsat	3	0,5	0,3
b Citra Spot	2	0,5	0,2
c Citra Radar	2	0,5	0,2
d a dan b	2	0,5	0,2
e a dan c	3	0,5	0,3
f b dan c	4	0,5	0,4
g a, b dan c	5	0,5	0,5
1. 5. TATA BATAS			
1. 5. 1. Pemancangan batas			
a Sudah dilakukan terhadap seluruh areal keja	5	1	1
b Sudah dilakukan namun belum mencakup seluruh area kerja	3	1	0,6
c Tidak dilakukan	0	1	0
1. 5. 2. Pengukuhan batas			
a Sudah dilakukan terhadap seluruh areal kerja (Temu Gelang) dan sudah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan	5	1	1
b Sudah dilakukan terhadap seluruh areal kerja namun belum dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan	3	1	0,6
c Sudah dilakukan namun belum mencakup seluruh area kerja	2	1	0,4
d Tidak dilakukan	0	1	0
1. 6. INVENTARISASI			
1. 6. 1. ITSP DAN SURVEY TOPOGRAFI			
a Dilakukan pada seluruh areal penebangan	5	1	1
b dilakukan namun tidak seluruh areal penebangan	3	1	0,6
c Tidak dilakukan	0	1	0

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
1. 6. 2. Dasar pelaksanaan			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5
1. 6. 3. Penyimpanan data ITSP dan Survey Topografi			
a File komputer (Digital)	3	0,5	0,3
b File manual	3	0,5	0,3
c a dan b	5	0,5	0,5
d Tidak ada file	0	0,5	0
1. 6. 4. Peta Pohon			
a Dibuat pada seluruh areal berdasarkan tahapan penebangan (produksi)	5	1	1
b Dibuat namun tidak mencakup seluruh areal berdasarkan tahapan penebangan (produksi)	3	1	0,6
c Tidak Dibuat	0	1	0
1. 6. 4. Inventarisasi hasil hutan non kayu			
a Dilakukan pada seluruh areal berdasarkan tahapan penebangan (produksi)	5	0,5	0,5
b Dibuat namun tidak mencakup seluruh areal berdasarkan tahapan penebangan	3	0,5	0,3
c Tidak dilakukan	0	0,5	0
SKORE I		15	
2. KELESTARIAN PRODUKSI			
2. 1. JALAN HUTAN			
2. 1. 1. Perencanaan hutan			
a Dibuat berdasar countur	5	1	1
b Dibuat tidak berdasarkan countur	3	1	0,6
c Tidak dibuat	0	1	0
2. 1. 2. Pembutan jalan			
2. 1. 2. 1. Standar Jalan induk, Jalan Cabang dan Jalan Ranting			
a > 80 % sesuai rencana	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % sesuai rencana	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % sesuai rencana	3	0,5	0,3
d < 60 % sesuai rencana	1	0,5	0,1
2. 1. 2. 2. Jalan sarad			
a > 80 % sesuai rencana	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % sesuai rencana	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % sesuai rencana	3	0,5	0,3
d < 60 % sesuai rencana	1	0,5	0,1
2. 1. 3. Pembuatan jembatan dan gorong-gorong			
a > 80 % dari kebutuhan	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % dari kebutuhan	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % dari kebutuhan	3	0,5	0,3
d < 60 % dari kebutuhan	1	0,5	0,1
2. 1. 4 Pembuatan dan pemasangan rambu-rambu Lalulintas Jalan Hutan			
a Ada, jumlahnya mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang tepat	5	0,5	0,5
b Ada, jumlahnya mencukupi namun penempatannya kurang tepat	3	0,5	0,3
c Ada, namun jumlahnya kurang mencukupi	1	0,5	0,1
2. 1. 5 Pemasangan Pal Km dan Hm			
a Ada, jumlahnya mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang tepat	5	0,5	0,5
b Ada, jumlahnya mencukupi namun penempatannya kurang tepat	3	0,5	0,3
c Ada, namun jumlahnya kurang mencukupi	1	0,5	0,1

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
2. 1. 6 Pemeliharaan jalan utama			
a Dilakukan secara rutin	5	1	1
b dilakukan namun tidak rutin	3	1	0,6
c Tidak dilakukan	1	1	0,2
2. 1. 7 Penebangan pohon			
a > 80 % sesuai peta pohon	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % sesuai peta pohon	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % sesuai peta pohon	3	0,5	0,3
d < 60 % sesuai peta pohon	1	0,5	0,1
2. 1. 8 Arah rebah			
a > 80 % sesuai peta pohon	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % sesuai peta pohon	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % sesuai peta pohon	3	0,5	0,3
d < 60 % sesuai peta pohon	1	0,5	0,1
2. 1. 9 TPN			
a Dibuat berdasarkan potensi tegakan	3	0,5	0,3
b Dibuat berdasarkan lingkungan	3	0,5	0,3
c a dan b	5	0,5	0,5
d Tidak a dan tidak b	0	0,5	0
2. 1. 10 TPK			
a Dibuat berdasarkan potensi tegakan	3	0,5	0,3
b Dibuat berdasarkan lingkungan	3	0,5	0,3
c a dan b	5	0,5	0,5
d Tidak a dan tidak b	0	0,5	0
2. 2. AAC atau JPT			
2. 2. 1. Jumlah pohon yang ditebang			
a > JPT	2	1	0,4
b = JPT	4	1	0,8
c < JPT	5	1	1
2. 2. 2. Volume pohon yang ditebang			
a > JPT	2	1	0,4
b = JPT	4	1	0,8
c < JPT	5	1	1
2. 3. KELESTARIAN FUNGSI HUTAN			
2. 3. 1. Persemaian			
a Dibuat dan mencukupi kebutuhan	5	1	1
b Dibuat namun tidak mencukupi kebutuhan	3	1	0,6
c Tidak Dibuat	0	1	0
2. 3. 2. Rehabilitasi TPK			
a > 80 % sesuai rencana	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % sesuai rencana	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % sesuai rencana	3	0,5	0,3
d < 60 % sesuai rencana	1	0,5	0,1
2. 3. 3. Bangunan sipil teknis			
a > 80 % sesuai rencana	5	0,5	0,5
b 70 - 80 % sesuai rencana	4	0,5	0,4
c 60 - 70 % sesuai rencana	3	0,5	0,3
d < 60 % sesuai rencana	1	0,5	0,1

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
2. 4. PRODUKSI			
2. 4. 1. Catatan produksi			
2. 4. 1. 1. Laporan hasil penebangan			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 2 Pemasangan Label pada tonggak dan bontos kayu			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 3 Laporan hasil produksi			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 4 Laporan luas tebangan tahunan			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 5 Peta realisasi luas tebangan			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 6 Peta Rehabilitasi Luas tebangan			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 7 Batas blok tebangan			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. 4. 1. 8 Penebangan diluar blok			
a Ada	0	0,5	0
b Tidak ada	5	0,5	0,5
2. 4. 1. 9 Sistim pengawasan oleh perusahaan			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
SKORE II		15	
3. MONITORING DAN EVALUASI			
3. 1. INVENTARISASI TEGAKAN TINGGAL			
a Dilakukan pada seluruh areal berdasarkan tanapan penebangan (produksi)	5	1	1
b Dibuat namun tidak mencakup seluruh areal berdasarkan tahapan penebangan (produksi)	3	1	0,6
c Tidak dilakukan	0	1	0
3. 1. 1. Teknik pelaksanaan ITT			
3. 1. 1. 1. Pohon			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. 1. 1. 2. Pancang			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5
3. 1. 1. 3. Tiang			
a Survey	3	0,5	0,3
b Analisa citra satelit	2	0,5	0,2
c Analisa Photo Udara	2	0,5	0,2
d b dan c	2	0,5	0,2
e a dan b	3	0,5	0,3
f a dan c	4	0,5	0,4
g a, b, dan c	5	0,5	0,5
3. 1. 1. 4. Penyimpanan data			
a File komputer	4	0,5	0,4
b File manual	3	0,5	0,3
c a dan b	5	0,5	0,5
d Tidak ada file	0	0,5	0
3. 2. PENERAPAN SILVIKULTUR PADA TEGAKAN TINGGAL			
3. 2. 1. Pembebasan			
a > 80 % dari areal	5	1	1
b 60 - 80 % dari areal	4	1	0,8
c 50 - 60 % dari areal	3	1	0,6
d < 50 % dari areal	1	1	0,2
3. 2. 2. Kapasitas persemaian			
a > 80 % dari kebutuhan	5	1,5	1,5
b 80 - 70 % dari kebutuhan	4	1,5	1,2
c 60 - 70 % dari kebutuhan	3	1,5	0,9
d < 60 % dari kebutuhan	1	1,5	0,3
3. 2. 3. Jenis tanaman persemaian			
a > 80 % unggulan setempat	5	1,5	1,5
b 80 - 70 % unggulan setempat	4	1,5	1,2
c 60 - 70 % unggulan setempat	3	1,5	0,9
d < 60 % unggulan setempat	1	1,5	0,3
3. 2. 4. Penelitian dan pengembangan			
a Dilakukan secara periodik tehadap seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen RKT	5	1	1
b Dilakukan secara periodik namun belum dilakukan terhadap seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen RKT	3	1	0,6
c Dilakukan namun tidak secara periodik dan belum dilakukan terhadap seluruh kegiatan sebaga mana yang dicantumkan dalam dokumen RKT	2	1	0,4
d Tidak dilakukan dalam 2 tahun terakhir	0	1	0

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. 2. 5. Plot pengukuran tetap			
a Ada	5	1	1
b Tidak ada	0	1	0
3. 2. 6. Pengukuran plot			
a Ada	5	1	1
b Tidak ada	0	1	0
3. 2. 7. Pelaporan hasil pengukuran			
a Ada	5	1	1
b Tidak ada	0	1	0
3. 2. 8. Tabel volume lokal			
a Ada	5	1	1
b Tidak ada	0	1	0
3. 3. IDENTIFIKASI & SELEKSI JENIS POHON PERMUDAAN			
3. 3. 1. Penentuan pohon inti			
a Ada, sesuai peraturan	5	1	1
b Ada, tidak sesuai peraturan	3	1	0,6
c Tidak ada	0	1	0
3. 3. 2. Jumlah pancang			
a > 80 % dari kebutuhan	5	1	1
b 80 - 70 % dari kebutuhan	4	1	0,8
c 60 - 70 % dari kebutuhan	3	1	0,6
d < 60 % dari kebutuhan	1	1	0,2
3. 3. 3. Jumlah tiang			
a > 80 % dari kebutuhan	5	1	1
b 80 - 70 % dari kebutuhan	4	1	0,8
c 60 - 70 % dari kebutuhan	3	1	0,6
d < 60 % dari kebutuhan	1	1	0,2
SKORE III		15	
4. KONSERVASI DAN LINGKUNGAN			
4. 1. KONSERVASI TANAH			
4. 1. 1. Penanaman areal kosong			
a > 80 % ditanami	5	0,5	**0,5**
b 80 - 70 % ditanami	4	0,5	**0,4**
c 60 - 70 % ditanami	3	0,5	**0,3**
d < 60 % ditanami	1	0,5	**0,1**
4. 1. 2. Penanaman kiri kanan jalan			
a > 80 % ditanami	5	0,5	**0,5**
b 80 - 70 % ditanami	4	0,5	**0,4**
c 60 - 70 % ditanami	3	0,5	**0,3**
d < 60 % ditanami	1	0,5	**0,1**
4. 1. 3. Rehabilitasi TPn			
a > 80 % ditanami	5	0,5	**0,5**
b 80 - 70 % ditanami	4	0,5	**0,4**
c 60 - 70 % ditanami	3	0,5	**0,3**
d < 60 % ditanami	1	0,5	**0,1**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
4. 1. 4. Penjarangaan			
a > 80 % dari areal	5	0,5	**0,5**
b 60 - 870 % dari areal	4	0,5	**0,4**
c 50 - 60 % dari areal	3	0,5	**0,3**
d < 50 % dari areal	1	0,5	**0,1**
4. 2. PERLINDUNGAN EKOSISTIM			
4. 2. 1. Pengelolaan kawasan lindung			
4. 2. 1. 1. Organisasi pergelola			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**
4. 2. 1. 2. Rencana kerja dan anggaran			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**
4. 2. 2. Kebun benih 100 Ha			
4. 2. 2. 1 Tata Batas			
a Telah dilakukan tata batas seluruhnya	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan namun belum seluruhnya	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan tata batas	0	0,5	**0**
4. 2. 2. 2 Penetapan dan pengukuhan kawasan			
a Telah dilakukan penetapan kawasan dan telah dikukuhkan secara internal	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan penetapan kawasan namun belum dikukuhkan secara internal	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan penetapan kawasan	0	0,5	**0**
4. 2. 2. 3 Rencana kerja dan anggaran			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan serta direalisasikan sepenuhnya	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja & anggaran pengelolaan namun belum direalisasikan sepenuhnya	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan	0	0,5	**0**
4. 2. 3. Kebun plasma nutfah			
4. 2. 3. 1 Tata Batas			
a Telah dilakukan tata batas seluruhnya	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan namun belum seluruhnya	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan tata batas	0	0,5	**0**
4. 2. 3 2 Penetapan dan pengukuhan kawasan			
a Telah dilakukan penetapan kawasan dan telah dikukuhkan secara internal	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan penetapan kawasan namun belum dikukuhkan secara internal	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan penetapan kawasan	0	0,5	**0**
4. 2. 3 3 Rencana kerja dan anggaran			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan serta direalisasikan sepenuhnya	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja & anggaran pengelolaan namun belum direalisasikan sepenuhnya	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan	0	0,5	**0**
4. 2. 4. Perlindungan daerah penyangga			
4. 2. 4. 1. 500 m dari hutan lindung			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
4. 2. 4. 2. Koridor satwa / Petak pengungsian satwa			
a Tersedia koridor satwa dan saling berhubungan antara satu petak dengan petak lainnya	5	0,5	0,5
b Tersedia koridor satwa namun tidak saling berhubungan antara satu petak dng petak lainnya	3	0,5	0,3
c Tidak tersedia koridor satwa / petak pengungsian satwa	0	0,5	0
4. 2. 4. 3. Areal kelerengan > 40 %			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**
4. 2. 4 4 Inventarisasi flora dan fauna langka/dilindungi			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**
4. 2. 4 5 Pengelolaan Sempadan Sungai			
4. 2. 4 5 1. Tanda Batas			
a Telah Dilakukan tanda batas pada seluruh kawasan	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan tanda batas, namun belum seluruhnya	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan tanda batas	0	0,5	**0**
4. 2. 4 5 2. Ketersediaan papan peringatan			
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada, namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia papan peringatan	0	0,5	**0**
4. 2. 4 5 3. Pengkayaan			
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan dengan jenis unggulan setempat	5	0,5	**0,5**
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis unggulan setempat	4	0,5	**0,4**
c Ada perencanaan namun belum direalisasikan.	3	0,5	**0,3**
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan	2	0,5	**0,2**
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan	0	0,5	**0**
4. 2. 4 6 Pengelolaan Sempadan danau/Waduk/Situ			
4. 2. 4 6 1. Tanda Batas			
a Telah Dilakukan tanda batas pada seluruh kawasan	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan tanda batas, namun belum seluruhnya	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan tanda batas	0	0,5	**0**
4. 2. 4 6 2. Ketersediaan papan peringatan			
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada, namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia papan peringatan	0	0,5	**0**
4. 2. 4 6 3. Pengkayaan			
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan dengan jenis unggulan setempat	5	0,5	**0,5**
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis unggulan setempat	4	0,5	**0,4**
c Ada perencanaan namun belum direalisasikan	3	0,5	**0,3**
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan	2	0,5	**0,2**
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan	0	0,5	**0**
4. 2. 4 7 Pengelolaan Sempadan Mata Air			
4. 2. 4 7 1. Tanda Batas			
a Telah Dilakukan tanda batas pada lokasi tersebut	5	0,5	**0,5**
b Belum dilakukan tanda batas pada lokasi tersebut	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
4. 2. 4 7 2. Ketersediaan papan peringatan			
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada, namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia papan peringatan	0	0,5	**0**
4. 2. 4 7 3. Pengkayaan			
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan dengan jenis unggulan setempat	5	0,5	**0,5**
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis unggulan setempat	4	0,5	**0,4**
c Ada perencanaan namun belum direalisasikan	3	0,5	**0,3**
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan	2	0,5	**0,2**
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan	0	0,5	**0**
4. 2. 4 8 Identifikasi dan Alokasi Kawasan HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)			
a Telah dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF	5	0,5	**0,5**
b Belum dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF	0	0,5	**0**
4. 3. PERLINDUNGAN FLORA DAN FAUNA			
4. 3. 1. Usaha pencegahan perburuan			
4. 3. 1. 1. Gambar satwa yang dilindungi			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada gambar satwa yang dilindungi	0	0,5	**0**
4. 3. 1. 2. Papan larangan berburu			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada papan larangan berburu	0	0,5	**0**
4. 4 Pengendalian Kerusakan			
4. 4 1 Perangkat pemantauan Erosi dan Sedimentasi (SPAS dan pengukur manual)			
a Ada dan berfungsi	5	1	**1**
b Ada dan tidak berfungsi	3	1	**0,6**
c Ada namun alat tidak terpasang	2	1	**0,4**
d Tidak ada	0	1	**0**
4. 4 1 1 Sistim pencegahan erosi dan sedimentasi			
a Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	0,5	**0,5**
b Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	0,5	**0,3**
c Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada SOP dan pencatatan	0	0,5	**0**
4. 4 1 2 Pelaporan hasil pencatatan dan evaluasi			
a Dilaporkan secara rutin ke instansi terkait	5	0,5	**0,5**
b Dilaporkan namun tidak ruitn	3	0,5	**0,3**
c Tidak pernah dilaporkan	0	0,5	**0**
4. 4 2 Tindakan pencegahan erosi			
4. 4 2 1 Plot Pemantuan erosi			
a Ada plot pemantuan erosi	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada plot pemataun erosi	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN			NILAI	BOBOT	SKOR
4. 4 2 2		**Penanaman Cover Crops pada areal te oing**			
	a	> 80 % ditanami	5	0,5	**0,5**
	b	80 - 70 % ditanami	3	0,5	**0,3**
	c	60 - 70 % ditanami	2	0,5	**0,2**
	d	< 60 % ditanami	0	0 5	**0**
4. 4 2 3		**Rintangan erosi**			
	a	Tersedia rintangan erosi dan jumlah mencukupi	5	0,5	**0,5**
	b	Tersedia rintangan erosi namun jum ahnya tidak mencukupi	3	0,5	**0,3**
	c	Tidak tersedia rin angan erosi khususnya pada areal yang rentang terjadinya erosi	0	0,5	**0**
4. 4 3		**Pencegahan pencurian dan perambahan kawasan**			
4. 4 3 1		**SOP pencegahan pencurian dan perambahan kawasan**			
	a	SOP lengkap,di osialisasikan,dilaksanakan serta dilakuka.. evaluasi dan perbaikan	5	0,5	**0,5**
	b	SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	**0,4**
	c	SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
	d	SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	**0,2**
	e	SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	**0,1**
	f	Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
4. 4 3 2		**Unit khusus pengamanan hutan**			
	a	Ada, mencukupi, telah dikukuhkan dan disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	5	0,5	**0,5**
	b	Ada, mencukupi, telah dikukuhkan namun tidak disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	3	0,5	**0,3**
	c	Ada namun junlah personilnya tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
	d	Tidak tersedia unit khusus pengamanan hutan	0	0,5	**0**
4. 4 3 3		**Perlengkapan keamanan**			
	a	Ada, mencukupi, dalam kondisi baik	5	0,5	**0,5**
	b	Ada, mencukupi namun sebagian dalam kondisi rusak (tidak berfungsi)	3	0,5	**0,3**
	c	Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
	d	Tidak tersedia perlengkapan keamanan sebagaimana mestinya	0	0,5	**0**
4. 4 3 4		**Kegiatan patroli dan penyuluhan kepada masyarakat**			
	a	Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaksanakan secara periodik	5	0,5	**0,5**
	b	Tersedia rencana kerja dan anggaran namun belum dilaksanakan secara periodik	3	0,5	**0,3**
	c	Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namun dilaksanakan walaupun tidak teratur	2	0,5	**0,2**
	d	Tidak tersedia rencana kerja anggaran dan tidak melaksanakan patroli serta penyuluhan sebagaimana mestinya	0	0,5	**0**
4. 4 3 5		**Penyelesaian konflik / masalah**			
	a	Tidak ada konflik	5	0,5	**0,5**
	b	Ada konflik dan dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	3	0,5	**0,3**
	c	Ada konflik dan belum seluruhnya dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	2	0,5	**0,2**
	d	Ada konflik dan tidak dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN			NILAI	BOBOT	SKOR
4. 4 4		**Pencegahan dan pengendalian kebakaran**			
4. 4 4	1	**SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran**			
	a	SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan perbaikan	5	1	**1**
	b	SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	1	**0,8**
	c	SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	1	**0,6**
	d	SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	1	**0,4**
	e	SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	1	**0,2**
	f	Tidak tersedia SOP	0	1	**0**
4. 4 4	2	**Unit khusus pengendalian kebakaran**			
	a	Ada, mencukupi dan disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	5	1	**1**
	b	Ada, mencukupi namun tidak disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	3	1	**0,6**
	c	Ada namun junlah personilnya tidak mencukupi	2	1	**0,4**
	d	Tidak tersedia unit khusus pengamanan hutan	0	1	**0**
4. 4 4	3	**Rencana kerja dan anggaran**			
	a	Tersedia rencana kerja dan anggaran serta direalisasikan sepenuhnya	5	1	**1**
	b	Tersedia rencana kerja & anggaran pengelolaan namun belum direalisasikan sepenuhnya	3	1	**0,6**
	c	Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namun melaksanakan upaya pengendalian kebakaran walaupun tidak teratur	2	1	**0,4**
	d	Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran dan tidak melaksanakan upaya pengendalian kebakaran	0	1	**0**
4. 4 4	4	**Ketersediaan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran hutan**			
		Ketersediaan sarana dan prasarana berikut dalam kondisi baik dan jumlah yang mencukupi yaitu:			
		Alat Manual dan Mekanis			
		Mobil Tangki/Pemadam			
		Embung Air			
		Menara Api			
		Alat Komunikasi			
		Peta Rawan Kebakaran			
	a	Tersedia seluruhnya	5	1	**1**
	b	Tersedia lima diantara tersebut diatas	4	1	**0,8**
	c	Tersedia empat diantara tersebut diatas	3	1	**0,6**
	d	Tersedia tiga diantara tersebut diatas	2	1	**0,4**
	e	Tersedia dua diantara tersebut diatas	1	1	**0,2**
	f	Tersedia satu diantara tersebut diatas	0	1	**0**
4. 4 4	5	**Ketersediaan early warning sistem**			
	a	Tersedia erly warning system, disosialisasikan dengan baik terus menerus	5	1	**1**
	b	Tersedia early warning system namun belum disosialisasikan dengan baik	3	1	**0,6**
	c	Tidak tersedia early warning system	0	1	**0**
4. 4 4	6	**Stasiun pengamat iklim**			
	a	Ada dan berfungsi dengan baik	5	1	**1**
	b	Ada namun tidak berfungsi dengan baik	3	1	**0,6**
	c	Tidak ada	0	1	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
4. 4 4 7 Upaya preventif pengendalian kebakaran hutan			
4. 4 4 7 1. Ketersedian papan peringatan / himbauan			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada papan peringatan bahaya kebakaran hutan	0	0,5	**0**
4. 4 4 7 2. Kegiatan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaksanakan secara periodik	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja dan anggaran namun belum dilaksanakan secara periodik	3	0.5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namun dilaksanakan walaupun tidak teratur	2	0.5	**0.2**
d Tidak tersedia rencana kerja anggaran dan tidak melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	0	0.5	**0**
4. 4 4 8 Kejadian kebakaran dalam satu tahun terakhir			
a Tidak pernah	5	0,5	**0,5**
b Terjadi sekali dalam satu tahun terakhir	3	0,5	**0,3**
c Terjadi lebih dari sekali dalam satu tahun terakhir	1	0,5	**0,1**
4. 5 PERLINDUNGAN HUTAN DAN PENGAMANAN HUTAN ALAM			
4. 5 1. Pembukaan tanpa izin			
a Ada	0	0,5	**0**
b Tidak ada	5	0,5	**0,5**
4. 5 2. Penebangan pohon yang dilindungi			
a Ada	0	0,5	**0**
b Tidak ada	5	0,5	**0,5**
4. 5 3. Penebangan sebelum RKT disyahkan			
a Ada	0	0,5	**0**
b Tidak ada	5	0,5	**0,5**
4. 5 4. Penebangan liar			
a Ada	0	0,5	**0**
b Tidak ada	5	0,5	**0,5**
4. 5 5. Perambahan hutan			
a Ada	0	0,5	**0**
b Tidak ada	5	0,5	**0,5**
4. 5 6 Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam (1 orang untuk luasan 3000 s/d 6000 Ha)			
a Cukup	5	0,5	**0,5**
b Tidak Cukup	0	0,5	**0**
4. 5 7 Keberadaan Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam (Jenjang Pendidikan dan Pelatihan)			
a Seluruhnya memiliki sertifikat	5	0,5	**0,5**
b lebih dari 50 % memiliki sertifikat	3	0,5	**0,3**
c kurang dari 50 % memiliki sertifikat	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada yang memiliki sertifikat	0	0,5	**0**
4. 4 8 Ketersediaan sarana dan prasarana SATPAM Pengamanan Hutan Alam			
Ketersediaan sarana dan prasarana berikut dalam kondisi baik dan jumlah			
Pos Jaga			
Perumahan			
Menara Pengawas			
Alat Transportasi			
Alat Komunikasi			
Perlengkapan Kerja dan Safety			
Perlatan Manual			

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
a Tersedia seluruhnya	5	1	1
b Tersedia enam diantara tersebut diatas	4	1	0,8
c Tersedia lima diantara tersebut diatas	3	1	0,6
d Tersedia empat diantara tersebut diatas	2	1	0,4
e Tersedia tiga diantara tersebut diatas	1	1	0,2
f Tersedia dua diantara tersebut diatas	0	1	0
4. 6 MANAJEMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			
4. 6 1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
a Ada kebijakan LH dan rencana kerja serta dilaksanakan dengan baik dan berkelanjutan	5	1	1
b Ada kebijakan LH dan rencana kerja namun belum dilaksanakan sepenuhnya	4	1	0,8
c Ada kebijakan LH namun tidak memiliki rencana kerja	3	1	0,6
d Tidak Ada kebijakan LH namun memiliki rencana kerja	2	1	0,4
e Tidak ada kebijakan LH dan rencana kerja	0	1	0
4. 6 2. Organisasi Unit PLH			
a Ada divisi khusus, dilengkapi tata laksana operasional dan berfungsi cukup baik	5	1	1
b Ada divisi khusus, dilengkapi tata laksana operasional namun belum berfungsi dengan baik	3	1	0,6
c Tidak ada divisi khusus namun sudah dilengkapi tata laksana operasional	2	1	0,4
d Tidak ada divisi khusus dan tata laksana operasional	0	1	0
4. 6 3. SDM pelaksana PLH			
a Ada, jumlah memadai dan mengikuti pelatihan lingkungan secara reguler baik internal maupun eksternal	5	1	1
b Ada, jumlah memadai namun jarang mengikuti pelatihan lingkungan	4	1	0,8
c Ada, jumlahnya memadai nanun tidak pernah mengikuti pelatihan/kursus lingkungan	3	1	0,6
d Ada petugas khusus namun jumlahnya terbatas	2	1	0,4
e Tidak ada petugas khusus dalam PLH	0	1	0
4. 6 4. Anggaran pengelolaan lingkungan			
a Anggaran memadai dan sesuai dengan program yang diusulkan	5	0,5	0,5
b Anggaran memadai namun tidak dimanfaatkan secara optimal	3	0,5	0,3
c Anggaran tersedia namun lebih kecil dari yang diprogramkan	2	0,5	0,2
d Ada usulan namun tidak dipenuhi	1	0,5	0,1
4. 6 5 Dokumen Lingkungan			
4. 6 5 1 Dokumen AMDAL, UKL/UPL			
a Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 3 bulan sekali	5	1	1
b Dokumen telah disahkan dan melakukan pelaporan minimal 6 bulan sekali	4	1	0,8
c Dokumen telah disahkan namun tidak melakukan pelaporan	3	1	0,6
d Dokumen masih dalam tahap penyelesaian	2	1	0,4
e Tidak memiliki dokumen pengelolaan Lingkungan hidup	0	1	0
4. 6 5 2 Pelaksanaan pengelolaan lingkungan			
a Dilaksanakan, sangat sesuai RKL	5	1	1
b Dilaksanakan, sesuai RKL	3	1	0,6
c Dilaksanakan namun tidak sesuai RKL	2	1	0,4
d Tidak dilaksanakan	0	1	0
4. 6 5 3 Pelaksanaan pemantauan lingkungan			
a Dilaksanakan, sangat sesuai RPL	5	1	1
b Dilaksanakan, sesuai RPL	3	1	0,6
c Dilaksanakan namun tidak sesuai RPL	2	1	0,4
d Tidak dilaksanakan	0	1	0
4. 6 5 4 Kesesuaian antara RKL & RPL			
a Sangat Sesuai	5	0,5	0,5
b Kurang Sesuai	3	0,5	0,3
c Tidak Sesuai	0	0,5	0

JENIS KEGIATAN		NILAI	BOBOT	SKOR
4. 6 6	**Prosedur tanggap darurat**			
a	Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasikan dengan baik, evaluasi secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keadaaan darurat secara rutin	5	0,5	**0,5**
b	Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasikan dengan baik, evaluasi secara reguler namun tidak pernah dilakukan latihan penanganan keadaaan darurat secara rutin	4	0,5	**0,4**
c	Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasikan dengan baik namun tidak ada evaluasi secara reguler dan latihan penanganan keadaaan darurat secara rutin	3	0,5	**0,3**
d	Prosedur tanggap darurat tersedia namun tidak tersosialisasikan dengan baik	2	0,5	**0,2**
e	Tidak tersedia prosedur tanggap darurat	0	0,5	**0**
4. 7	**Pengelolaan Limbah B3**			
4. 7 1	**SOP pengelolaan limbah B3**			
a	SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	5	0,5	**0,5**
b	SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	4	0,5	**0,4**
c	SOP lengkap namun belum dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
d	SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	2	0,5	**0,2**
e	Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
4. 7 2	**Tempat Penyimpanan sementara Limbah B3**			
a	Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis bangunan , tersedia log book dan menyampaikan laporan secara rutin	5	0,5	**0,5**
b	Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis bangunan , tersedia log book namun belum menyampaikan laporan secara rutin	4	0,5	**0,4**
c	Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis bangunan namun tidak terdapat log book dan belum menyampaikan laporan secara rutin	3	0,5	**0,3**
d	TPS limbah B3 tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku	2	0,5	**0,2**
e	Tidak memiliki TPS limbah B3	0	0,5	**0**
4. 7 3	**Izin penyimpanan sementara Limbah B3**			
a	Memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 yang masih berlaku	5	0,5	**0,5**
b	Memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 namun telah habis masa berlakunya	3	0,5	**0,3**
c	Izin penyimpanan sementara limbah B3 masih dalam proses penyelesaian	2	0,5	**0,2**
d	Tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	0	0,5	**0**
4. 7 4	**Penyerahan dan pemanfaatan Limbah B3**			
a	Menyerahkan pada pengumpul yang memiliki izin dari KLH sesuai ketentuan yang berlaku	5	0,5	**0,5**
b	Pemanfaatan kembali limbah B3 dengan disertai izin dari KLH	3	0,5	**0,3**
c	Pemanfaatan kembali limbah B3 disertai izin dari KLH (izin dalam proses)	2	0,5	**0,2**
d	Pemanfaatan kembali limbah B3 tanpa disertai izin dari KLH	0	0,5	**0**
4. 8	**Pengelolaan workshop dan tempat penyimpanan BBM**			
4. 8 1	**Pengelolaan Workshop**			
a	Permanen, lantai kedap air, tertata rapi,dilengkapi oil trap	5	0,5	**0,5**
b	Permanen, lantai kedap air,tertata rapi namun tidak dilengkapi oil trap	3	0,5	**0,3**
c	Permanen,tertata rapi namun lantai tidak kedap air dan tidak dilengkapi oil trap	2	0,5	**0,2**
d	Tidak permanen,lantai tidak kedap air dan tidak dilengkapi oil trap	1	0,5	**0,1**
4. 8 2	**SOP Workshop**			
a	Tersedia SOP workshop yang lengkap	5	0,5	**0,5**
b	Tersedia SOP workshop namun tidak lengkap	3	0,5	**0,3**
c	Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
4. 8 3	**Tempat penyimpanan BBM**			
a	Tertutup, lantai kedap air dan dilengkapi oil trap	5	0,5	**0,5**
b	Terbuka, lantai kedap air dan dilengkapi oil trap	3	0,5	**0,3**
c	Terbuka, lantai tidak kedap air dan tidak dilengkapi oil trap	1	0,5	**0,1**

JENIS KEGIATAN		NILAI	BOBOT	SKOR
4. 9	**Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan**			
4. 9 1	**Ekolabel (Sertifikasi LEI dan FSC)**			
a	Telah memperoleh sertifikat ekolabel dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir	5	0,5	**0,5**
b	Telah memperoleh sertifikat ekolabel dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	4	0,5	**0,4**
c	Pernah mendapat sertifikat ekolabel namun telah dicabut oleh tim asesor karena berbagai penyimpangan	3	0,5	**0,3**
d	Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh tim asesor, tahapan & sistim dokumentasi telah tersedia	2	0,5	**0,2**
e	Proses awal untuk memperoleh sertifikasi ekolabel telah dilakukan	1	0,5	**0,1**
f	Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi ekolabel	0	0,5	**0**
4. 9 2	**ISO 14001**			
a	Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir	5	0,5	**0,5**
b	Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	4	0,5	**0,4**
c	Pernah mendapat sertifikat ISO 14001 namun telah dicabut oleh tim asesor karena berbagai penyimpangan	3	0,5	**0,3**
d	Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh tim asesor, tahapan & sistim dokumentasi telah tersedia	2	0,5	**0,2**
e	Proses awal untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 telah dilakukan	1	0,5	**0,1**
f	Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi ISO 14001	0	0,5	**0**
4. 9 3	**Setifikasi PHPL**			
a	Telah memperoleh sertifikat PHPL dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir	5	0,5	**0,5**
b	Telah memperoleh sertifikat PHPL dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	4	0,5	**0,4**
c	Pernah mendapat sertifikat PHPL namun telah dicabut oleh tim asesor karena berbagai penyimpangan	3	0,5	**0,3**
d	Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh tim asesor, tahapan & sistim dokumentasi telah tersedia	2	0,5	**0,2**
e	Proses awal untuk memperoleh sertikasi PHPL telah dilakukan	1	0,5	**0,1**
f	Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi PHPL	0	0,5	**0**
4. 9 4	**Audit Lingkungan**			
a	Audit lingkungan dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali oleh lembaga audit independen dan memiliki audit lingkungan internal perusahaan	5	0,5	**0,5**
b	Audit lingkungan dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali oleh tim audit lingkungan internal perusahaan sesuai kaidah audit yang benar	4	0,5	**0,4**
c	Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit lingkungan internal perusahaan sesuai kaidah audit yang benar namun tidak terprogram	3	0,5	**0,3**
d	Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit lingkungan internal perusahaan namun tidak sesuai kaidah audit yang benar dan tidak terprogram	2	0,5	**0,2**
e	Tidak pernah melakukan audit lingkungan	0	0,5	**0**
SKORE IV			45	
5.	**SOSIAL EKONOMI**			
5. 1.	**KETENAGAKERJAAN**			
5. 1. 1.	**Organisasi pekerja**			
a	Ada	5	0,5	0,5
b	Tidak ada	0	0,5	0
5. 1. 2	**Struktur Organisasi**			
a	Ada, lengkap disertai uraian tugas yang jelas	5	0,5	0,5
b	Ada, lengkap namun belum disertai uraian tugas yang jelas	3	0,5	0,3
c	Ada, namun kurang lengkap	1	0,5	0,1

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
5. 1. 3 Ketersediaan Tenaga Profesional			
a Tersedia tenaga profesional,mencukupi sesuai kebutuhan dan penempatannya sesuai	5	0,5	0,5
b Tersedia tenaga profesional,mencukupi namun penempatannya kurang sesuai	3	0,5	0,3
c Tenaga profesional yang ada kurang mencukupi	1	0,5	0,1
5. 1. 4 Jenjang Pengembangan karir			
a Tersedia jenjang pengembangan karir yang jelas dan selama ini telah direalisasikan	5	0,5	0,5
b Tersedia jenjang pengembangan karir yang jelas namun selama ini belum direalisasikan	3	0,5	0,3
c Tidak tersedia jenjang pengembangan karir	0	0,5	0
5. 1. 5 Jumlah pegawai			
a > 80 % dari kebutuhan	5	1	1
b 70 - 80 % dari kebutuhan	4	1	0,8
c 60 - 70 % dari kebutuhan	3	1	0,6
d < 60 % dari kebutuhan	1	1	0,2
5. 1. 6 Komposisi tenaga kerja			
a > 80 % Penduduk local	5	1	1
b 70 - 80 % Penduduk lokal	4	1	0,8
c 60 - 70 % Penduduk lokal	3	1	0,6
d < 60 % Per duduk lokal	1	1	0,2
5. 2. KESELAMATAN KERJA			
5. 2. 1. Prosedur tetap kerja			
a Ada	5	1	1
b Tidak ada	0	1	0
5. 2. 2. Klinik			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
5. 2. 3. Jaminan sosial			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
5. 2. 4. Pelatihan kerja			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
5. 3. PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT			
5. 3. 1. Kebijakan dan program pengembangan kemasyarakatan			
a Upaya pengembangan kemasyarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	0,5	0,5
b Kebijakan dan program pengembangan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	0,5	0,4
c Kebijakan dan program pengembangan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	0,5	0,3
d kebijakan dan program pengembangan masyarakat tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	0,5	0,2
e Kebijakan dan program pengembangan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	0,5	0,1
f Tidak ada kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	0	0,5	0

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
5. 3. 2. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat			
a Upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	0,5	**0,5**
b Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	0,5	**0,4**
c Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	0,5	**0,3**
d Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	0,5	**0,2**
e Program peningkatan kualitas pendidikan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	0,5	**0,1**
f Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	0	0,5	**0**
5. 3. 3. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat			
a Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	0,5	**0,5**
b Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	0,5	**0,4**
c Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	0,5	**0,3**
d Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	0,5	**0,2**
e Program peningkatan kualitas kesehatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	0,5	**0,1**
f Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	0	0,5	**0**
5. 3. 4. Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan			
a Upaya pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	0,5	**0,5**
b Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	0,5	**0,4**
c Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	0,5	**0,3**
d Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	0,5	**0,2**
e Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	0,5	**0,1**
f Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
5. 3. 5. Pembangunan infrastruktur			
a Upaya pembangunan infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	0,5	0,5
b Program pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	0,5	0,4
c Program pembangunan infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	0,5	0,3
d Program pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	1	0,5	0,1
e Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	0,5	0,1
f Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan	0	0,5	0
5. 3. 6 Konflik sosial dengan masyarakat			
a Tidak Ada	5	1	1
b Ada dan dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	3	1	0,6
c Ada dan belum seluruhnya dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	2	1	0,4
d Ada dan tidak dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	0	1	0
SKORE V		10	
TOTAL SKORE			
PERINGKAT			

ITERIA

EMAS : Total nilai 91-100 (SANGAT BAIK)

HIJAU : Total nilai 71-90 (BAIK)

BIRU : Total nilai 41-70 (SEDANG)

MERAH : Total nilai 21-40 (JELEK)

HITAM : Total nilai 0 - 20 (SANGAT JELEK)

SKORING PENILAIAN

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (%)	SCORE TERTINGGI	KRITERIA PENILAIAN
1.	PERENCANAAN	15	15	SANGAT BAIK : 91 - 100 BAIK : 71 - 90 SEDANG : 41 - 70 JELEK : 21 - 40 SANGAT JELEK : 0 - 20
2.	KELESTARIAN PRODUKSI	15	15	
3.	MONITORING DAN EVALUASI	15	15	
4.	KONSERVASI / LINGKUNGAN	45	45	
5.	SOSIAL EKONOMI	10	10	
	JUMLAH	**100**	**100**	

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK-HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR / KRITERIA PENILAIAN LAPANGAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

A. DATA UMUM

1. Nama Perusahaan : .....
2. Pemilik Perusahaan : .....
3. SK. PHTI : .....
   Nomor : .....
   Tanggal : .....
4. Alamat / Telp. Kantor
   - Pusat .....
   - Cabang .....
5. Lokasi
   - Pemerintahah .....
   - Dinas Kehutanan .....
   - Kelompok Hutan .....
   - DAS/Sub DAS .....
6. Batas Areal Kerja
   - Sebelah Utara .....
   - Sebelah Barat .....
   - Sebelah Selatan .....
   - Sebelah Timur .....
7. Luas .....Ha
8. Tahun Mulai Operasi

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
1. PERENCANAAN			
1. 1. Penyusunan Rencana			
1. 1. 1. Studi Kelayakan			
a. Belum dibuat	0	1	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	1	**0,2**
c. Sudah dibuat belum disahkan	3	1	**0,6**
d. Sudah dibuat dan sudah disahkan	5	1	**1**
1. 1. 2. Rencana Karya Pengusahaan Hutan			
a. Belum dibuat	0	1	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	1	**0,2**
c. Sudah dibuat belum disahkan	3	1	**0,6**
d. Sudah dibuat dan sudah disahkan	5	1	**1**
1. 1. 3. Rencana Karya Tahunan			
a. Belum dibuat	0	1	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	1	**0,2**
c. Sudah dibuat belum disahkan	3	1	**0,6**
d. Sudah dibuat dan sudah disahkan	5	1	**1**
1. 2. Penataan Hutan			
1. 2. 1. Pembuatan Tata Batas			
a. Belum dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dalam proses pelaksanaan	1	0,5	**0,1**
c. Selesai dilaksanakan tetapi belum dikukuhkan	3	0,5	**0,3**
d. Sudah selesai dan dikukuhkan	5	0,5	**0,5**
1 2 2 Pengukuhan batas			
a Sudah dilakukan terhadap seluruh areal kerja (Temu Gelang) dan sudah dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan	5	1	**1**
b Sudah dilakukan terhadap seluruh areal kerja namun belum dikukuhkan oleh Menteri Kehutanan	3	1	**0,6**
c Sudah dilakukan namun belum mencakup seluruh areal kerja	1	1	**0,2**
d Tidak dilakukan	0	1	**0**
1. 2. 3 Pembentukan Bagian Unit			
a. Belum dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dalam proses pelaksanaan	1	0,5	**0,1**
c. Selesai dilaksanakan tetapi belum dikukuhkan	3	0,5	**0,3**
d. Sudah selesai dan dikukuhkan	5	0,5	**0,5**
1. 2. 4 Pembagian Blok / Petak			
a. Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dalam proses pelaksanaan	1	0,5	**0,1**
c. Dilaksanakan kurang sesuai dengan ketentuan	3	0,5	**0,3**
d. Dilaksanakan sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
1. 2. 5 Risalah Petak			
a. Belum dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dalam proses pelaksanaan	1	0,5	**0,1**
c. Dilaksanakan kurang sesuai ketentuan	3	0,5	**0,3**
d. Telah dilaksanakan sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
1. 3. Pembukaan Wilayah Hutan (PWH)			
1. 3. 1. Penataan Penggunaan Lahan Hutan			
a. Belum direncanakan	0	0,5	**0**
b. Direncanakan tetapi belum seluruhnya	1	0,5	**0,1**
c. Direncanakan seluruhnya	2	0,5	**0,2**
d. Dilaksanakan tetapi perlu perbaikan	3	0,5	**0,3**
e. Dilaksanakan dan sesuai rencana	5	0,5	**0,5**
1. 3. 2. Penetapan Kelas Kesesuaian Lahan (Data Kelas Kesesuaian Lahan Untuk Setiap Jenis Tanaman Pada Areal HTI)			
a. Belum dibuat	0	0,5	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	0,5	**0,1**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	0,5	**0,3**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	0,5	**0,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
1. 3. 3. Potensi Produksi Masing-masing Kelas Lahan Pada Akhir Daur			
a. Belum dibuat	0	0,5	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	0,5	**0,1**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	0,5	**0,3**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	0,5	**0,5**
1. 3. 4. System Site Index Setiap Jenis Tanaman (Data Site Index Setiap Jenis Tanaman Pada Areal HTI)			
a. Belum dibuat	0	0,5	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	0,5	**0,1**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	0,5	**0,3**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	0,5	**0,5**
1. 3. 5. Potensi Produksi Masing-masing Site Index Pada Akhir Daur			
a. Belum dibuat	0	0,5	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	0,5	**0,1**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	0,5	**0,3**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	0,5	**0,5**
1. 3. 6. Ketersediaan Data Analisa Jenis Tanah / Peta Tanah			
a. Belum dibuat	0	1	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	1	**0,2**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	1	**0,6**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	1	**1**
1. 3. 7. Ketersediaan Peta Jenis Tanaman HTI			
a. Belum dibuat	0	1	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	1	**0,2**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	1	**0,6**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	1	**1**
1. 3. 8. Ketersediaan Volume Produksi Setiap Jenis Tanaman Pada Masing-Masing Areal HTI			
a. Belum dibuat	0	1	**0**
b. Dalam proses penyusunan	1	1	**0,2**
c. Sudah dibuat, namun belum mencakup seluruh areal kerja	3	1	**0,6**
d. Sudah dibuat pada seluruh areal kerja	5	1	**1**
1. 3. 9. Prasarana Jalan Utama dan Jalan Cabang			
a. Tersedia, menjangkau seluruh areal pengerasan jalan dan dapat dipergunakan sepanjang tahun	0	1	**0**
b. Tersedia, menjangkau seluruh areal, namun kondisinya sebagian belum dapat dipergunakan sepanjang tahun	1	1	**0,2**
c. Tersedia, namun belum menjangkau seluruh areal dan kondisi jalan yang ada pengerasan dan dapat dipergunakan sepanjang tahun.	3	1	**0,6**
d. Tersedia, belum menjangkau seluruh areal dan jalan yang sudah ada belum permanen dan tidak dapat dipergunakan sepanjang tahun.	5	1	**1**
1 3 10. Pemeliharaan jalan utama dan jalan cabang			
a Dilakukan secara rutin	5	1	**1**
b dilakukan namun tidak rutin	3	1	**0,6**
c Tidak dilakukan	0	1	**0**
1. 3. 11. Pembuatan dan Pemasangan Rambu-Rambu Lalulintas Jalan Hutan			
a. Ada, namun jumlahnya kurang mencukupi	1	1	**0,2**
b. Ada, jumlahnya mencukupi namun penempatannya pada lokasi kurang tepat	3	1	**0,6**
c. Ada, jumlahnya mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang tepat	5	1	**1**
1 3 12. Pemasangan Pal Km dan Hm			
a Ada, jumlahnya mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang tepat	5	0,5	**0,5**
b Ada, jumlahnya mencukupi namun penempatannya kurang tepat	3	0,5	**0,3**
c Ada, namun jumlahnya kurang mencukupi	1	0,5	**0,1**
SKORE I		15	
2. PENGORGANISASIAN			
2. 1. Pembuatan Struktur Organisasi			
a. Belum dibuat/belum ada	0	1,5	**0**
b. Ada tetapi tidak lengkap	3	1,5	**0,9**
c. Ada dan lengkap	5	1,5	**1,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
2. 2. Pembuatan Tata Kerja			
a. Belum dibuat	0	1,5	**0**
b. Ada tetapi tidak dirinci	3	1,5	**0,9**
c. Ada dan terinci	5	1,5	**1,5**
2. 3. Penggunaan Tenaga Teknis Kehutanan			
a. Tidak Ada	0	1	**0**
b. Ada, kurang mencukupi, penempatan tidak sesuai keahlian	1	1	**0,2**
c. Ada, kurang mencukupi, penempatan sesuai keahlian	2	1	**0,4**
d. Ada, mencukupi, penempatan kurang sesuai bidang keahlian	3	1	**0,6**
e. Ada, mencukupi, penempatan sesuai bidang keahlian	5	1	**1**
2. 4. Pengembangan Kemampuan dan Karier Tenaga Teknis Kehutanan			
a. Tidak ada, tidak terencana	0	1	**0**
b. Tidak ada, tetapi direncanakan	1	1	**0,2**
c. Ada, tidak terencana	3	1	**0,6**
d. Ada, terencana dengan baik	5	1	**1**
SKORE II		**5**	
3. PELAKSANAAN & PENGAWASAN			
3. 1. Pelaksanaan			
3. 1. 1. Pengadaan Benih			
3. 1. 1. 1. Asal Benih			
a. Pembelian benih tanpa sertifikat	0	0,5	**0**
b. Pembelian benih dengan sertifikat	1	0,5	**0,1**
c. Sumber benih sendiri tanpa sertifikat	3	0,5	**0,3**
d. Sumber benih sendiri dengan sertifikat	5	0,5	**0,5**
3. 1. 1. 2. Pembangunan Sumber Benih			
a. Tidak mempunyai sumber benih sendiri	0	0,5	**0**
b. Mempunyai tegakan benih, belum dikukuhkan	1	0,5	**0,1**
c. Mempunyai tegakan benih, sudah dikukuhkan	2	0,5	**0,2**
d. Mempunyai kebun benih, belum diproduksi	3	0,5	**0,3**
e. Mempunyai kebun benih dan sudah berproduksi	5	0,5	**0,5**
3. 1. 1. 3. Penyimpanan Benih			
a. Tidak ada fasilitas storage	0	0,5	**0**
b. Ada, tetapi kurang memenuhi persyaratan	3	0,5	**0,3**
c. Ada dan memenuhi persyaratan	5	0,5	**0,5**
3. 1. 1. 4. Kualitas Benih			
a. Jelek	0	0,5	**0**
b. Sedang	1	0,5	**0,1**
c. Cukup	2	0,5	**0,2**
d. Baik	3	0,5	**0,3**
e. Sangat Baik	5	0,5	**0,5**
3. 1. 2. Pengadaan Bibit			
3. 1. 2. 1. Asal Bibit			
a. Pembelian bibit seluruhnya	1	0,5	**0,1**
b. Kombinasi pembelian dan persemaian	3	0,5	**0,3**
c. Seluruhnya persemaian sendiri	5	0,5	**0,5**
3. 1. 2. 2. Persemaian			
a. Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b. Ada, status sementara dan tidak memenuhi syarat	1	0,5	**0,1**
c. Ada, status semi permanen, kurang memenuhi syarat	2	0,5	**0,2**
d. Ada, status semi permanen, memenuhi syar	3	0,5	**0,3**
e. Ada, status permanen, memenuhi syarat	5	0,5	**0,5**
3. 1. 2. 3. SOP Pengolahan Tanah			
a Tidak ada SOP dan pencatatan	0	0,5	**0**
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	0,5	**0,2**
c Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	0,5	**0,3**
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	0,5	**0,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. 1. 2. 4. Kualitas Bibit			
a. Jelek	0	0,5	**0**
b. Sedang	1	0,5	**0,1**
c. Cukup	2	0,5	**0,2**
d. Baik	3	0,5	**0,3**
e. Sangat Baik	5	0,5	**0,5**
3. 1. 2. 5. Administrasi Persemaian			
a. Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b. Dibuat, tidak terinci dan tidak kontinyu	1	0,5	**0,1**
c. Dibuat, terinci dan tidak kontinyu	2	0,5	**0,2**
d. Dibuat, tidak terinci dan kontinyu	3	0,5	**0,3**
e. Dibuat, terinci, kontinyu	5	0,5	**0,5**
3. 1. 3. Pembuatan Tanaman			
3. 1. 3. 1. Penyiapan Lahan			
1. 1. Pembersihan Lapangan			
a Chemis	1	0,5	**0,1**
b Manual	2	0,5	**0,2**
c Semi Mekanis	3	0,5	**0,3**
d Kombinasi	4	0,5	**0,4**
e Total Mekanis	5	0,5	**0,5**
1. 2. Pengolahan Tanah			
a Manual	2	0,5	**0,2**
b Semi Mekanis	3	0,5	**0,3**
c Kombinasi	4	0,5	**0,4**
d Total Mekanis	5	0,5	**0,5**
1. 3. SOP Pengolahan Tanah			
a Tidak ada SOP dan pencatatan	0	0,5	**0**
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	0,5	**0,2**
c Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	0,5	**0,3**
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	0,5	**0,5**
1. 4. Pengawetan Tanah			**0**
a Tidak memperhatikan aspek pengawetan	0	0,5	**0**
b Kurang memperhatikan aspek pengawetan	3	0,5	**0,3**
c Memperhatikan aspek pengawetan	5	0,5	**0,5**
3. 1. 3. 2. Penanaman			
2. 1. Realisasi Tanaman			
a Belum dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dalam pelaksanaan, realisasi tidak sesuai target	1	0,5	**0,1**
c Dalam pelaksanaan, realisasi sesuai target	3	0,5	**0,3**
d Selesai dilaksanakan sesuai target	5	0,5	**0,5**
2. 2. Prosentase Tumbuh			
a Sangat jelek (< 50%)	0	0,5	**0**
b Jelek (50 - 60%)	1	0,5	**0,1**
c Sedang (60 - 70%)	2	0,5	**0,2**
d Baik (70- -90%)	3	0,5	**0,3**
e Sangat baik (> 90%)	5	0,5	**0,5**
2. 3. Kualitas Tanaman			
a Jelek	0	0,5	**0**
b Sedang	1	0,5	**0,1**
c Cukup	2	0,5	**0,2**
d Baik	3	0,5	**0,3**
e Sangat Baik	5	0,5	**0,5**
2. 4. Pengaturan Jarak			
a Tidak teratur	0	0,5	**0**
b Teratur, tetapi tidak sesuai ketentuan	3	0,5	**0,3**
c Teratur dan sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
2. 5. Administrasi Penanaman			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak terinci dan tidak kontinyu	1	0,5	**0,1**
c Dibuat, terinci tidak kontinyu	2	0,5	**0,2**
d Dibuat, tidak terinci dan kontinyu	3	0,5	**0,3**
e Dibuat, terinci dan kontinyu	5	0,5	**0,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. 1. 3. 3. Pemeliharaan tanaman			
3. 1. Intensitas Pemeliharaan Tanaman			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan tidak teratur	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan teratur sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
3. 2. Penyiangan			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan tidak teratur	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan teratur sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
3. 3. Pendangiran			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan tidak teratur	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan teratur sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
3. 4. Penyulaman			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan tidak teratur	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan teratur sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
3. 5. Pemupukan			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan tidak teratur	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan teratur sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
3. 1. 3. 4. Sekat Bakar			
4. 1. Pembuatan Sekat Bakar			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak sesuai ketentuan	3	0,5	**0,3**
c Dibuat, sesuai ketentuan	5	0,5	**0,5**
4. 2. Jenis Sekat Bakar			**0**
a Jalur vegetatif (jalur hijau)	3	0,5	**0,3**
b Jalur civil teknis (jalur kuning)	3	0,5	**0,3**
c Jalur Kombinasi	4	0,5	**0,4**
d Kombinasi	5	0,5	**0,5**
3. 1. 4. Pemeliharaan Tegakan			
3. 1. 4. 1. Pemangkasan Cabang			
1. Realisasi Pemangkasan			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan, tidak seluruh areal tanaman	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan, seluruh areal tanaman	5	0,5	**0,5**
2. Kualitas Pemangkasan			
a Jelek	0	0,5	**0**
b Sedang	1	0,5	**0,1**
c Cukup	3	0,5	**0,3**
d Baik	5	0,5	**0,5**
3. 1. 4. 2. Penjarangan			
1. Realisasi Penjarangan			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan, tidak seluruh areal	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan, seluruh areal tanam	5	0,5	**0,5**
2. Kualitas Penjarangan			
a Jelek	0	0,5	**0**
b Sedang	1	0,5	**0,1**
c Cukup	3	0,5	**0,3**
d Baik	5	0,5	**0,5**
3. 1. 4. 3. Administrasi Pemeliharaan Tegakan			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak terinci dan tidak kontinyu	1	0,5	**0,1**
c Dibuat, terinci, dan tidak kontinyu	2	0,5	**0,2**
d Dibuat, tidak terinci, dan kontinyu	3	0,5	**0,3**
e Dibuat, terinci dan kontinyu	5	0,5	**0,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. 1. 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana			
3. 1. 5. 1. Pondok Kerja			
1. 1. Pembuatan pondok kerja			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak mencukupi	3	0,5	**0,3**
c Dibuat dan mencukupi	5	0,5	**0,5**
1. 2. Kualitas pondok kerja			
a Jelek	0	0,25	**0**
b Sedang	3	0,25	**0,15**
c Baik	5	0,25	**0,25**
3. 1. 5. 2. Base Camp			
2. 1. Sarana base camp			
a Tidak	0	0,25	**0**
b Ada terbatas	3	0,25	**0,15**
c Ada cukup baik	5	0,25	**0,25**
2. 2. Tata ruang base camp			
a Jelek	0	0,25	**0**
b Sedang	1	0,25	**0,05**
c Cukup	2	0,25	**0,1**
d Baik	3	0,25	**0,15**
e Sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 3. Sarana perkantoran			
a Jelek	0	0,25	**0**
b Sedang	1	0,25	**0,05**
c Cukup	2	0,25	**0,1**
d Baik	3	0,25	**0,15**
e Sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 4. Perumahan karyawan			
a Jelek	0	0,25	**0**
b Sedang	1	0,25	**0,05**
c Cukup	2	0,25	**0,1**
d Baik	3	0,25	**0,15**
e Sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 5. Sarana ibadah			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang	1	0,25	**0,05**
c Ada, cukup	2	0,25	**0,1**
d Ada, baik	3	0,25	**0,15**
e Ada, sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 6. Sarana pendidikan			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang memenuhi syarat	2	0,25	**0,1**
c Ada, cukup baik	3	0,25	**0,15**
d Ada, sangat baik dan lengkap	5	0,25	**0,25**
2. 7. Sarana kesehatan			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang memenuhi syarat	2	0,25	**0,1**
c Ada, cukup baik	3	0,25	**0,15**
d Ada, sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 8. Sarana air bersih			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang memenuhi syarat	2	0,25	**0,1**
c Ada, cukup baik	3	0,25	**0,15**
d Ada, sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 9. Sarana olah raga			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang memenuhi syarat	2	0,25	**0,1**
c Ada, cukup baik	3	0,25	**0,15**
d Ada, sangat baik	5	0,25	**0,25**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
2. 10. Sarana rekreasi			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang memenuhi syarat	2	0,25	**0,1**
c Ada, cukup baik	3	0,25	**0,15**
d Ada, sangat baik	5	0,25	**0,25**
2. 11. Sarana koperasi			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, kurang memenuhi syarat	2	0,25	**0,1**
c Ada, cukup baik	3	0,25	**0,15**
d Ada, sangat baik dan memenuhi kebutuhan karyawan serta telah dimanfaatkan lebih 3 tahun	5	0,25	**0,25**
3. 1. 5. 3. Peralatan / perlengkapan			
3. 1. Peralatan kantor			
a Tidak memadai	0	0,25	**0**
b Memadai	5	0,25	**0,25**
3. 2. Peralatan lapangan / survey			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, tidak sesuai kebutuhan	3	0,25	**0,15**
c Ada, sesuai kebutuhan	5	0,25	**0,25**
3. 3. Peralatan berat			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, jumlah tidak mencukupi	3	0,25	**0,15**
c Ada, jumlah mencukupi	5	0,25	**0,25**
3. 4. Peralatan perbengkelan			
a Tidak memadai	0	0,25	**0**
b Cukup memadai	3	0,25	**0,15**
c Ada, jumlah memadai dan lengkap	5	0,25	**0,25**
3. 1. 5. 4. Sarana Transportasi			
4. 1. Angkutan tenaga kerja			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, tidak mencukupi	3	0,25	**0,15**
c Ada, mencukupi	5	0,25	**0,25**
4. 2. Angkutan barang			
a Tidak ada	0	0,25	**0**
b Ada, tidak mencukupi	3	0,25	**0,15**
c Ada, mencukupi	5	0,25	**0,25**
3. 1. 5. 5. Administrasi Sarana & Prasarana			
5. 1. Administrasi rencana & realisasi pengadaan sarana & prasarana			
a Tidak dibuat	0	0,25	**0**
b Dibuat, tidak terinci	3	0,25	**0,15**
c Dibuat, terinci	5	0,25	**0,25**
5. 2. Administrasi & realisasi pemeliharaan sarana & prasarana			
a Tidak dibuat	0	0,25	**0**
b Dibuat, tidak terinci	3	0,25	**0,15**
c Dibuat, terinci	5	0,25	**0,25**
3. 1. 6. Penelitian dan Pengembangan			
1. Kegiatan penelitian dan pengembangan			
a Dilakukan secara periodik tehadap seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen RKT	5	0,5	**0,5**
b Dilakukan secara periodik namun belum dilakukan terhadap seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen RKT	3	0,5	**0,3**
c Dilakukan namun tidak secara periodik dan belum dilakukan terhadap seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam dokumen RKT	2	0,5	**0,2**
d Tidak dilakukan dalam 2 tahun terakhir	0	0,5	**0**
2. Uji coba tanaman (asal dan jenis)			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. Uji coba pemuliaan pohon			
1. Uji coba pemuliaan pohon tingkat semai			
a. Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
2. Uji coba pemuliaan pohon tingkat lapangan			
a. Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
4. Penelitian Silvikultur			
1. Penelitian persemaian			
a. Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
2. Penelitian penyiapan lahan dan penanaman			
a. Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
3. Penelitian pemeliharaan dan perlindungan hutan			
a. Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b. Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
5. Penelitian Tanah			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
6. Penelitian penanaman			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
7. Penelitian sosial ekonomi kehutanan			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
8. Manajemen			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
9. Hutan Kemasyarakatan			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan	5	0,5	**0,5**
10. Organisasi Penelitian			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat , tidak lengkap	3	0,5	**0,3**
c Dibuat dan lengkap	5	0,5	**0,5**
3. 2. Pengawasan			
3. 2. 1. Pengawasan Administrasi			
1. 1. Laporan Ketenagaan			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak terinci	1	0,5	**0,1**
c Dibuat, terinci, tidak kontinyu	2	0,5	**0,2**
d Dibuat, tidak terinci, kontinyu	3	0,5	**0,3**
e Dibuat, terinci, kontinyu	5	0,5	**0,5**
1. 2. Laporan Keuangan			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak terinci	1	0,5	**0,1**
c Dibuat, terinci, tidak kontinyu	2	0,5	**0,2**
d Dibuat, tidak terinci, kontinyu	3	0,5	**0,3**
e Dibuat, terinci, kontinyu	5	0,5	**0,5**
3. 2. 2. Pengawasan Teknis			
2. 1. Laporan Kemajuan Pekerjaan			
a Tidak dibuat	0	0,5	**0**
b Dibuat, tidak terinci	1	0,5	**0,1**
c Dibuat, terinci, tidak kontinyu	2	0,5	**0,2**
d Dibuat, tidak terinci, kontinyu	3	0,5	**0,3**
e Dibuat, terinci, kontinyu	5	0,5	**0,5**
2. 2. Pemeriksaan Fisik			
a Tidak dilaksanakan	0	0,5	**0**
b Dilaksanakan tidak teratur	3	0,5	**0,3**
c Dilaksanakan dan teratur	5	0,5	**0,5**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. 2. 3. Organisasi Pengawasan			
a Tidak dibuat	0	0,5	0
b Dibuat, tidak lengkap	3	0,5	0,3
c Dibuat dan lengkap	5	0,5	0,5
3. 2. 4. SOP Pengawasan Intern			
a Tidak tersedia SOP	0	0,5	0
b SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	0,1
c SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	0,2
d SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	0,3
e SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	0,4
f SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi/perbaikan	5	0,5	0,5
SKORE III		30	
4. KONSERVASI DAN LINGKUNGAN			
4. 1. Perlindungan Hutan			
4. 2. Perlindungan Ekosistem			
1. Pengelolaan Kawasan Lindung			
1. Organisasi Pengelola			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
2. Rencana kerja dan anggaran			
a Ada	5	0,5	0,5
b Tidak ada	0	0,5	0
4. 2. 2. Pengelolaan Sempadan Sungai			
1. Tata Batas			
a Telah Dilakukan tanda batas pada seluruh kawasan	5	0,5	0,5
b Telah dilakukan tanda batas, namun belum seluruhnya	3	0,5	0,3
c Belum dilakukan tanda batas	0	0,5	0
2. Ketersediaan Papan Peringatan			
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis	5	0,5	0,5
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis	3	0,5	0,3
c Ada, namun tidak mencukupi	2	0,5	0,2
d Tidak tersedia papan peringatan	0	0,5	0
3. Pengkayaan			
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan dengan jenis unggulan setempat	5	0,5	0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis unggulan setempat	4	0,5	0,4
c Ada perencanaan namun belum direalisasikan	3	0,5	0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan	2	0,5	0,2
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan	0	0,5	0
4. 2. 3. Pengelolaan Sempadan Danau / Waduk / Situ			
1. Tanda Batas			
a Telah Dilakukan tanda batas pada seluruh kawasan	5	0,5	0,5
b Telah dilakukan tanda batas, namun belum seluruhnya	3	0,5	0,3
c Belum dilakukan tanda batas	0	0,5	0
2. Ketersediaan Papan Peringatan			
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis	5	0,5	0,5
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis	3	0,5	0,3
c Ada, namun tidak mencukupi	2	0,5	0,2
d Tidak tersedia papan peringatan	0	0,5	0
3. Pengkayaan			
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan dengan jenis unggulan	5	0,5	0,5
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis unggulan setempat	4	0,5	0,4
c Ada perencanaan namun belum direalisasikan	3	0,5	0,3
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan	2	0,5	0,2
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan	0	0,5	0
4. 2. 4. Pengelolaan Sempadan Mata Air			
1. Tanda Batas			
a Telah Dilakukan tanda batas pada lokasi tersebut	5	0,5	0,5
b Belum dilakukan tanda batas pada lokasi tersebut	0	0,5	0

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
2. Ketersediaan Papan Peringatan			
a Ada, mencukupi dan penempatannya pada lokasi yang strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun penempatannya kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada, namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia papan peringatan	0	0,5	**0**
3. Pengkayaan			
a Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan dengan jenis unggulan	5	0,5	**0,5**
b Ada perencanaan dan dilakukan pengkayaan namun bukan dengan jenis unggulan setempat	4	0,5	**0,4**
c Ada perencanaan namun belum direalisasikan	3	0,5	**0,3**
d Dilakukan pengkayaan tanpa disertai dengan perencanaan	2	0,5	**0,2**
e Tidak ada perencanaan dan pengkayaan	0	0,5	**0**
4. 2. 5. Pengelolaan Areal Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN)			
1. Tata Batas			
a Telah dilakukan tata batas seluruhnya	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan namun belum seluruhnya	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan tata batas	0	0,5	**0**
2. Penetapan dan pengukuhan kawasan			
a Telah dilakukan penetapan kawasan dan telah dikukuhkan secara internal	5	0,5	**0,5**
b Telah dilakukan penetapan kawasan namun belum dikukuhkan secara internal	3	0,5	**0,3**
c Belum dilakukan penetapan kawasan	0	0,5	**0**
3. Rencana kerja dan anggaran			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan serta direalisasikan sepenuhnya	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja & anggaran pengelolaan namun belum direalisasikan sepenuhnya	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran untuk pengelolaan	0	0,5	**0**
4. 2. 6. Identifikasi dan Alokasi Kawasan HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)			
a Telah dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF	5	0,5	**0,5**
b Belum dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF	0	0,5	**0**
4. 3. Perlindungan Flora dan Fauna			
1. Inventarisasi flora dan fauna langka/dilindungi			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**
2. Usaha Pencegahan Perburuan			
1. Gambar satwa yang dilindungi			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada gambar satwa yang dilindungi	0	0,5	**0**
2. Papan Larangan Berburu			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada papan larangan berburu	0	0,5	**0**
3. Koridor Satwa / Petak Pengungsian Satwa			
a Tersedia koridor satwa dan saling berhubungan antara satu petak dengan petak lainnya	5	0,5	**0,5**
b Tersedia koridor satwa namun tidak saling berhubungan antara satu petak dengan petak lainnya	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia koridor satwa / petak pengungsian satwa	0	0,5	**0**
4. Areal Kelerengan > 40 %			
a Ada	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada	0	0,5	**0**
4. 4. Pengendalian Kerusakan			
1. Perangkat Pemantauan Erosi/Sedimentasi (SPAS/Pengukur Manual)			
a Ada dan berfungsi	5	0,5	**0,5**
b Ada dan tidak berfungsi	3	0,5	**0,3**
c Ada namun alat tidak terpasang	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
2. Sistim pencegahan erosi dan sedimentasi			
a Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	0,5	**0,5**
b Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	0,5	**0,3**
c Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada SOP dan pencatatan	0	0,5	**0**
3. Pelaporan hasil pencatatan dan evaluasi			
a Dilaporkan secara rutin ke instansi terkait	5	0,5	**0,5**
b Dilaporkan namun tidak ruitn	3	0,5	**0,3**
c Tidak pernah dilaporkan	0	0,5	**0**
4. Tindakan Pencegahan Erosi			
1. Plot Pemantauan Erosi			
a Ada plot pemantuan erosi	5	0,5	**0,5**
b Tidak ada plot pematauan erosi	0	0,5	**0**
2. Penanaman Cover Crops pada areal tebing			
a > 80 % ditanami	5	0,5	**0,5**
b 80 - 70 % ditanami	3	0,5	**0,3**
c 60 - 70 % ditanami	2	0,5	**0,2**
d < 60 % ditanami	0	0,5	**0**
3. Rintangan Erosi			
a Tersedia rintangan erosi dan jumlah mencukupi	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rintangan erosi namun jumlahnya tidak mencukupi	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rintangan erosi khususnya pada areal yang rentang terjadinya erosi	0	0,5	**0**
5. Pengendalian Hama dan Penyakit			
1. SOP Pengendalian Hama dan Penyakit			
a SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan perbaikan	5	0,5	**0,5**
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	**0,4**
c SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	**0,2**
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	**0,1**
f Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
2. Unit Khusus Yang Menangani Hama dan Penyakit			
a Ada, mencukupi, telah dikukuhkan dan disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi, telah dikukuhkan namun tidak disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	3	0,5	**0,3**
c Ada namun junlah personilnya tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia unit khusus pengamanan hutan	0	0,5	**0**
3. Sarana dan Prasarana Pengendalian Hama dan Penyakit			
a Ada, mencukupi, dalam kondisi baik	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun sebagian dlm kondisi rusak(tidak berfungsi)	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia perlengkapan keamanan sebagaimana mestinya	0	0,5	**0**
6. Pencegahan Pencurian dan Perambahan Kawasan			
1 SOP pencegahan pencurian dan perambahan kawasan			
a SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan perbaikan	5	0,5	**0,5**
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	**0,4**
c SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	**0,2**
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	**0,1**
f Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
2 Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam (1 orang untuk luasan 3000 s/d 6000 Ha)			
a Cukup	5	0,5	**0,5**
b Tidak Cukup	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3 Keberadaan Personil SATPAM Pengamanan Hutan Alam			
(Jenjang Pendidikan dan Pelatihan)			
a Seluruhnya memiliki sertifikat	5	0,5	**0,5**
b lebih dari 50 % memiliki sertifikat	3	0,5	**0,3**
c kurang dari 50 % memiliki sertifikat	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada yang memiliki sertifikat	0	0,5	**0**
4 Ketersediaan sarana dan prasarana SATPAM Pengamanan Hutan Alam			
Ketersediaan sarana dan prasarana berikut dalam kondisi baik dan jumlah yang mencukupi yaitu:			
Pos Jaga			
Perumahan			
Menara Pengawas			
Alat Transportasi			
Alat Komunikasi			
Perlengkapan Kerja dan Safety			
Perlatan Manual			
a Tersedia seluruhnya	5	1	**1**
b Tersedia enam diantara tersebut diatas	4	1	**0,8**
c Tersedia lima diantara tersebut diatas	3	1	**0,6**
d Tersedia empat diantara tersebut diatas	2	1	**0,4**
e Tersedia tiga diantara tersebut diatas	1	1	**0,2**
f Tersedia dua diantara tersebut diatas	0	1	**0**
5 Kegiatan patroli dan penyuluhan kepada masyarakat			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaksanakan secara periodik	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja dan anggaran namun belum dilaksanakan secara periodik	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namun dilaksanakan walaupun tidak teratur	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia rencana kerja anggaran dan tidak melaksanakan patroli serta penyuluhan sebagaimana mestinya	0	0,5	**0**
6 Penyelesaian konflik / masalah			
a Tidak ada konflik	5	0,5	**0,5**
b Ada konflik dan dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	3	0,5	**0,3**
c Ada konflik dan belum seluruhnya dapat diselesaikan(disertai Berita Acara)	2	0,5	**0,2**
d Ada konflik dan tidak dapat diselesaikan	0	0,5	**0**
7 SOP Penanganan konflik lahan			
a SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan perbaikan	5	0,5	**0,5**
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	**0,4**
c SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	**0,2**
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	**0,1**
f Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
7. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran			
1. SOP pencegahan dan pengendalian kebakaran			
a SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan	5	0,5	**0,5**
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	**0,4**
c SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	**0,2**
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	**0,1**
f Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
2. Unit khusus pengendalian kebakaran			
a Ada, mencukupi, telah dikukuhkan dan disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi, telah dikukuhkan namun tidak disertai dengan pelatihan yang dilakukan secara periodik	3	0,5	**0,3**
c Ada namun junlah personilnya tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia unit khusus pengamanan hutan	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. Rencana kerja dan anggaran			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran serta direalisasikan sepenuhnya	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja & anggaran pengelolaan namun belum direalisasikan sepenuhnya	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namun melaksanakan upaya pengendalian kebakaran walaupun tidak teratur	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran dan tidak melaksanakan upaya pengendalian kebakaran	0	0,5	**0**
4. Ketersediaan sarana & prasarana pengendalian kebakaran hutan			
Ketersediaan sarana & prasarana berikut dalam kondisi baik dan jumlah yang mencukupi yaitu :			
Alat manual dan mekanis			
Mobil tangki/pemadam			
Embung air			
Menara api			
Alat komunikasi			
Peta rawan kebakaran			
a Tersedia seluruhnya	5	0,5	**0,5**
b Tersedia lima diantara tersebut diatas	4	0,5	**0,4**
c Tersedia empat diantara tersebut diatas	3	0,5	**0,3**
d Tersedia tiga diantara tersebut diatas	2	0,5	**0,2**
e Tersedia dua diantara tersebut diatas	1	0,5	**0,1**
f Tersedia satu diantara tersebut diatas	0	0,5	**0**
5. Ketersediaan early warning sistem			
a Tersedia erly warning system, disosialisasikan dengan baik terus menerus	5	0,5	**0,5**
b Tersedia early warning system namun belum disosialisasikan dengan baik	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia early warning system	0	0,5	**0**
6. Stasiun pengamat iklim			
a Ada dan berfungsi dengan baik	5	0,5	**0,5**
b Ada namun tidak berfungsi dengan baik	3	0,5	**0,3**
c Tidak ada	0	0,5	**0**
7. Upaya Preventif Pengendalian Kebakaran Hutan			
1. **Ketersedian papan peringatan / himbauan**			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pd lokasi yg kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada papan peringatan bahaya kebakaran hutan	0	0,5	**0**
2. **Kegiatan penyuluhan,sosialisasi & pembinaan kpd masyarakat**			
a Tersedia rencana kerja dan anggaran dan dilaksanakan secara periodik	5	0,5	**0,5**
b Tersedia rencana kerja dan anggaran namun belum dilaksanakan secara periodik	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia rencana kerja dan anggaran namun dilaksanakan walaupun tidak teratur	2	0,5	**0,2**
d Tidak tersedia rencana kerja anggaran dan tidak melaksanakan penyuluhan, sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat	0	0,5	**0**
8. Kejadian kebakaran dalam satu tahun terakhir			
a Tidak pernah	5	0,5	**0,5**
b Terjadi sekali dalam satu tahun terakhir	3	0,5	**0,3**
c Terjadi lebih dari sekali dalam satu tahun terakhir	1	0,5	**0,1**
9. Perlindungan Flora dan Fauna			
1. **Gambar satwa yang dilindungi**			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada gambar satwa yang dilindungi	0	0,5	**0**
2. **Papan larangan berburu**			
a Ada, mencukupi dan ditempatkan pada lokasi strategis	5	0,5	**0,5**
b Ada, mencukupi namun ditempatkan pada lokasi yang kurang strategis	3	0,5	**0,3**
c Ada namun tidak mencukupi	2	0,5	**0,2**
d Tidak ada papan larangan berburu	0	0,5	**0**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
3. **SOP Identifikasi Satwa Liar dan Habitatnya**			
a SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan perbaikan	5	0,5	0,5
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	0,4
c SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	0,3
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	0,1
f Tidak tersedia SOP	0	0,5	0
4. 5. Manajemen Pengelolaan Lingkungan Hidup			
1. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
a Ada kebijakan LH & rencana kerja serta dilaksanakan dgn baik & berkelanjutan	5	1	1
b Ada kebijakan LH dan rencana kerja namun belum dilaksanakan sepenuhnya	4	1	0,8
c Ada kebijakan LH namun tidak memiliki rencana kerja	3	1	0,6
d Tidak Ada kebijakan LH namun memiliki rencana kerja	2	1	0,4
e Tidak ada kebijakan LH dan rencana kerja	0	1	0
2. Organisasi Unit PLH			
a Ada divisi khusus, dilengkapi tata laksana operasional dan berfungsi cukup baik	5	1	1
b Ada divisi khusus, dilengkapi tata laksana operasional namun belum berfungsi dgn	3	1	0,6
c Tidak ada divisi khusus namun sudah dilengkapi tata laksana operasional	2	1	0,4
d Tidak ada divisi khusus dan tata laksana operasional	0	1	0
3. SDM Pelaksana PLH			
a Ada, jumlah memadai dan mengikuti pelatihan lingkungan secara reguler baik internal	5	1	1
b Ada, jumlah memadai namun jarang mengikuti pelatihan lingkungan	4	1	0,8
c Ada, jumlahnya memadai nanun tidak pernah mengikuti pelatihan/kursus lingkungan	3	1	0,6
d Ada petugas khusus namun jumlahnya terbatas	2	1	0,4
e Tidak ada petugas khusus dalam PLH	0	1	0
4. Anggaran Pengelolaan Lingkungan			
a Anggaran memadai dan sesuai dengan program yang direncanakan	5	1	1
b Anggaran memadai namun tidak dimanfaatkan secara optimal	3	1	0,6
c Anggaran tersedia namun lebih kecil dari yang direncanakan	2	1	0,4
d Ada usulan namun tidak dipenuhi		1	0,2
5. Dokumen Lingkungan			
1. Dokumen AMDAL, UKL/UPL			
a Dokumen telah disahkan dan melakukan	5	1	1
b Dokumen telah disahkan dan melakukan	4	1	0,8
c Dokumen telah disahkan namun tidak	3	1	0,6
d Dokumen masih dalam tahap penyelesaian	2		0,4
e Tidak memiliki dokumen pengelolaan Lingkungan hidup	0	1	0
2. Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan			
a Dilaksanakan, sangat sesuai RKL	5	1	1
b Dilaksanakan, sesuai RKL	3	1	0,6
c Dilaksanakan namun tidak sesuai RKL	2	1	0,4
d Tidak dilaksanakan	0	1	0
3. Pelaksanaan Pemantauan Lingkungan			
a Dilaksanakan, sangat sesuai RPL	5	1	1
b Dilaksanakan, sesuai RPL	3	1	0,6
c Dilaksanakan namun tidak sesuai RPL	2	1	0,4
d Tidak dilaksanakan	0	1	0
4. Kesesuaian antara RKL & RPL			
a Sangat Sesuai	5	1	1
b Kurang Sesuai	3	1	0,6
c Tidak Sesuai	0	1	0
5. SOP Pemantauan dan Pengelolaan Lingkungan			
a SOP lengkap,disosialisasikan,dilaksanakan serta dilakukan evaluasi dan perbaikan	5	0,5	0,5
b SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	4	0,5	0,4
c SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	3	0,5	0,3
d SOP lengkap namun belum dilaksanakan	2	0,5	0,2
e SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	1	0,5	0,1
f Tidak tersedia SOP	0	0,5	0

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
6. Prosedur Tanggap Darurat			
a Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasikan dengan baik, evaluasi secara reguler dan dilakukan latihan penanganan keadaaan darurat secara rutin	5	0,5	**0,5**
b Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasikan dengan baik, evaluasi secara reguler namun tidak pernah dilakukan latihan penanganan keadaaan darurat secara rutin	4	0,5	**0,4**
c Tersedia prosedur tanggap darurat, tersosialisasikan dengan baik namun tidak ada evaluasi secara reguler dan latihan penanganan keadaaan darurat secara rutin	3	0,5	**0,3**
d Prosedur tanggap darurat tersedia namun tidak tersosialisasikan dengan baik	2	0,5	**0,2**
e Tidak tersedia prosedur tanggap darurat	0	0,5	**0**
4. 6. Pengelolaan Limbah B3			
1. SOP Pengelolaan Limbah B3			
a SOP lengkap, disosialisasikan dan dilaksanakan dengan baik	5	0,5	**0,5**
b SOP lengkap, disosialisasikan namun belum sepenuhnya dilaksanakan	4	0,5	**0,4**
c SOP lengkap namun belum dilaksanakan	3	0,5	**0,3**
d SOP tidak lengkap dan tidak disosialisasikan	2	0,5	**0,2**
e Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
2. Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3			
a Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis bangunan , tersedia log book dan menyampaikan laporan secara rutin	5	0,5	**0,5**
b Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis bangunan , tersedia log book namun belum menyampaikan laporan secara rutin	4	0,5	**0,4**
c Tersedia TPS limbah B3 yang sesuai persyaratan teknis bangunan namun tidak terdapat log book dan belum menyampaikan laporan secara rutin	3	0,5	**0,3**
d TPS limbah B3 tidak memenuhi persyaratan teknis bangunan sesuai ketentuan yang berlaku	2	0,5	**0,2**
e Tidak memiliki TPS limbah B3	0	0,5	**0**
3. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3			
a Memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 yang masih berlaku	5	0,5	**0,5**
b Memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3 namun telah habis masa berlakunya	3	0,5	**0,3**
c izin penyimpanan sementara limbah B3 masih dalam proses penyelesaian	2	0,5	**0,2**
d Tidak memiliki izin penyimpanan sementara limbah B3	0	0,5	**0**
4. Penyerahan dan Pemanfaatan Limbah B3			
a Menyerahkan pada pengumpul yang memiliki izin dari KLH sesuai ketentuan yang berlaku	5	0,5	**0,5**
b Pemanfaatan kembali limbah B3 dengan disertai izin dari KLH	3	0,5	**0,3**
c Pemanfaatan kembali limbah B3 disertai izin dari KLH (izin dalam proses)	2	0,5	**0,2**
d Pemanfaatan kembali limbah B3 tanpa disertai izin dari KLH	0	0,5	**0**
4. 7. Pengelolaan Workshop dan Tempat Penyimpanan BBM			
1. Pengelolaan Workshop			
a Permanen, lantai kedap air,tertata rapi,dilengkapi oil trap	5	0,5	**0,5**
b Permanen, lantai kedap air,tertata rapi namun tidak dilengkapi oil trap	3	0,5	**0,3**
c Permanen,tertata rapi namun lantai tidak kedap air dan tidak dilengkapi oil trap	2	0,5	**0,2**
d Tidak permanen,lantai tidak kedap air dan tidak dilengkapi oil trap	1	0,5	**0,1**
2. SOP Workshop			
a Tersedia SOP workshop yang lengkap	5	0,5	**0,5**
b Tersedia SOP workshop namun tidak lengkap	3	0,5	**0,3**
c Tidak tersedia SOP	0	0,5	**0**
3. Tempat Penyimpanan BBM			
a Tertutup, lantai kedap air dan dilengkapi oil trap	5	0,5	**0,5**
b Terbuka, lantai kedap air dan dilengkapi oil trap	3	0,5	**0,3**
c Terbuka, lantai tidak kedap air dan tidak dilengkapi oil trap	1	0,5	**0,1**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
4. 8. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan			
1. Ekolabel			
a Telah memperoleh sertifikat ekolabel dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir	5	0,5	**0,5**
b Telah memperoleh sertifikat ekolabel dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	4	0,5	**0,4**
c Pernah mendapat sertifikat ekolabel namun telah dicabut oleh tim asesor karena berbagai penyimpangan	3	0,5	**0,3**
d Proses sertifikasi sedang dilakukan oleh tim asesor, tahapan & sistim dokumentasi telah tersedia	2	0,5	**0,2**
e Proses awal untuk memperoleh sertifikasi ekolabel telah dilakukan	1	0,5	**0,1**
f Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi ekolabel	0	0,5	**0**
2. ISO 14001			
a Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir	5	0,5	**0,5**
b Telah memperoleh sertifikat ISO 14001 dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	4	0,5	**0,4**
c Pernah mendapat sertifikat ISO 14001 namun telah dicabut oleh tim asesor karena berbagai penyimpangan	3	0,5	**0,3**
d Proses sertifikasi sdg dilakukan oleh tim asesor, tahapan & sistim dokumentasi tersedia	2	0,5	**0,2**
e Proses awal untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001 telah dilakukan	1	0,5	**0,1**
f Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi ISO 14001	0	0,5	**0**
3. Sertifikasi Pengelolaan Lingkungan Lainnya			
a Telah memperoleh sertifikat PHTL dari lembaga sertifikasi dalam 2 tahun terakhir	5	0,5	**0,5**
b Telah memperoleh sertifikat PHTL dari lembaga sertifikasi dalam 1 tahun terakhir	4	0,5	**0,4**
c Pernah mendapat sertifikat PHTL namun telah dicabut oleh tim asesor karena berbagai penyimpangan	3	0,5	**0,3**
d Proses sertifikasi sdg dilakukan tim asesor, tahapan & sistim dokumentasi telah tersedia	2	0,5	**0,2**
e Proses awal untuk memperoleh sertikasi PHTL telah dilakukan	1	0,5	**0,1**
f Tidak ada upaya dalam proses memperoleh sertifikasi PHTL	0	0,5	**0**
4. Audit Lingkungan			
a Audit lingkungan dilakukan secara rutin minimal 2 tahun sekali oleh lembaga audit independen dan memiliki audit lingkungan internal perusahaan	5	0,5	**0,5**
b Audit lingkungan dilakukan secara rutin minimal 1 tahun sekali oleh tim audit lingkungan internal perusahaan sesuai kaidah audit yang benar	4	0,5	**0,4**
c Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit lingkungan internal perusahaan sesuai kaidah audit yang benar namun tidak terprogram	3	0,5	**0,3**
d Audit lingkungan dilakukan oleh tim audit lingkungan internal perusahaan namun tidak sesuai kaidah audit yang benar dan tidak terprogram	2	0,5	**0,2**
e Tidak pernah melakukan audit lingkungan	0	0,5	**0**
4. 9. Dampak Lingkungan			
1. Erosi (pada daerah yang terukur)			
a Ringan (dibawah ambang batas)	5	0,5	**0,5**
b Sedang	3	0,5	**0,3**
c Berat	0	0,5	**0**
2. Banjir			
a Tidak ada banjir pada musim hujan	5	0,5	**0,5**
b Terjadi hanya berupa spot-pot di areal kerja pada musim hujan	3	0,5	**0,3**
c Terjadi di sebagian besar lokasi dan pemukiman pada musim hujan	0	0,5	**0**
SKORE IV		**40**	
5. SOSIAL EKONOMI			
5. 1. Penyerapan Tenaga Lokal & Perluasan Kesempatan Kerja			
a Ada dan cukup	5	1	**1**
b Ada, terbatas	3	1	**0,6**
c Tidak ada	0	1	**0**
5. 2. Kebijakan dan program pengembangan kemasyarakatan			
a Upaya pengembangan kemasyarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	1,5	**1,5**
b Kebijakan dan program pengembangan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	1,5	**1,2**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
c Kebijakan dan program pengembangan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	1,5	**0,9**
d kebijakan dan program pengembangan masyarakat tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	1,5	**0,6**
e Kebijakan dan program pengembangan masyarakat hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	1,5	**0,3**
f Tidak ada kebijakan dan program pemberdayaan masyarakat	0	1,5	**0**
5. 3. Peningkatan Kualitas Pendidikan Masyarakat			
a Upaya peningkatan kualitas pendidikan masyarakat merupakan program konsep yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	1,5	**1,5**
b Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	1,5	**1,2**
c Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	1,5	**0,9**
d Program peningkatan kualitas pendidikan masyarakat dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	1,5	**0,6**
e Program peningkatan kualitas pendidikan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	1,5	**0,3**
f Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat	0	1,5	**0**
5. 4. Peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat			
a Upaya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan	5	1,5	**1,5**
b Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	1,5	**1,2**
c Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	1,5	**0,9**
d Program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	1,5	**0,6**
e Program peningkatan kualitas kesehatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	1,5	**0,3**
f Tidak ada kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat	0	1,5	**0**
5. 5. Pemberdayaan Ekonomi Kemasyarakatan			
a Upaya pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	1,5	**1,5**
b Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	1,5	**1,2**
c Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	1,5	**0,9**
d Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	1,5	**0,6**
e Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	1,5	**0,3**
f Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan	0	1,5	**0**
5. 6. Pembangunan Infrastruktur			
a Upaya pembangunan infrastruktur merupakan program yang menjadi satu kesatuan dengan bisnis perusahaan dan dilakukan dengan konsep keberlanjutan dengan mengintegrasikan keseimbangan ekonomi lingkungan dan sosial serta rencana pembangunan pemerintah setempat	5	1,5	**1,5**
b Program pembangunan infrastruktur berdasarkan kajian aspek sosial ekonomi masyarakat serta partisipasi masyarakat yang tinggi	4	1,5	**1,2**

JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
c Program pembangunan infrastruktur berdasarkan partisipasi masyarakat namun tanpa kajian aspek sosial ekonomi masyarakat terlebih dahulu	3	1,5	0,9
d Program pembangunan infrastruktur dilakukan tanpa perencanaan dan partisipasi masyarakat	2	1,5	0,6
e Program pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan hanya berdasarkan permintaan masyarakat	1	1,5	0,3
f Tidak ada kegiatan pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan	0	1,5	0
5. 7. Konflik Sosial dengan Masyarakat			
a Tidak Ada	5	1,5	1,5
b Ada dan dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	3	1,5	0,9
c Ada dan belum seluruhnya dapat diselesaikan (disertai Berita Acara)	2	1,5	0,6
d Ada dan tidak dapat diselesaikan	0	1,5	0
SKORE V		10	
TOTAL SKORE			
PERINGKAT			

KRITERIA

EMAS : 91 - 100 % (SANGAT BAIK)
HIJAU : 71 - 90 % (BAIK)
BIRU : 41 - 70 % (SEDANG)
MERAH : 21 - 40 % (JELEK)
HITAM : 0 - 20 % (SANGAT JELEK)

SKORING PENILAIAN

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (%)	SCORE TERTINGGI	KRITERIA PENILAIAN
1.	PERENCANAAN	15	15	SANGAT BAIK : 91 - 100 BAIK : 71 - 90 SEDANG : 41 - 70 JELEK : 21 - 40 SANGAT JELEK : 0 - 20
2.	PENGORGANISASIAN	5	5	
3.	PELAKSANAAN & PENGAWASAN	30	30	
4.	KONSERVASI & LINGKUNGAN	40	40	
5.	ASPEK SOSIAL EKONOMI	10	10	
	JUMLAH	**100**	**100**	

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK-HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

INDIKATOR / KRITERIA PENILAIAN LAPANGAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI)

A. DATA UMUM :

a. Nama Perusahaan :

b. Nama Pemilik .

c. Alamat Perusahaan
   1. Pusat :
   2. Cabang :

d. Lokasi Kebun
   - Desa :
   - Kecamatan :
   - Kabupaten :
   - Provinsi :

e. Jenis Tanaman Yang Diusahakan :

PENILAIAN JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
1. ASPEK MANAJEMEN			
1. Perencanaan Tahunan Perusahaan			
- Belum dibuat	0	5	0
- Dalam Proses Penyusunan	1	5	1
- Sudah dibuat belum disahkan	3	5	3
- Sudah dibuat dan disahkan	5	5	5
2. Perencanaan 5 Tahunan Perusahaan			
- Belum dibuat	0	5	0
- Dalam Proses Penyusunan	1	5	1
- Sudah dibuat belum disahkan	3	5	3
- Sudah dibuat dan disahkan	5	5	5
3. Tenaga Kerja			
- Ada, kurang mencukupi	1	5	1
- Ada, mencukupi, penempatan kurang sesuai keahlian	3	5	3
- Ada, mencukupi, penempatan sesuai keahlian	5	5	5
4. Pelaporan			
- Ada, belum dikirim	0	5	0
- Ada, hanya dikirim ke Kab./Kota	1	5	1
- Ada, hanya dikirim ke Provinsi	3	5	3
- Ada, dikirim ke Dirjenbun, Provinsi dan Kab./Kota	5	5	5
SKORE I		20	
2. ASPEK PELAKSANAAN			
1. Pemanfaatan Lahan			
- Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 30 %	0	5	0
- Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 50 %	1	5	1
- Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 90 %	3	5	3
- Presentase luas lahan yang sudah dimanfaatkan 100 %	5	5	5
2. Pemeliharaan Tanaman			
a. SOP			
a Tidak ada SOP dan pencatatan	0	2	0
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	2	0,8
c Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	2	1,2
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	2	2
b. Pelaksanaan Pemupukan			
- Tidak dipupuk	0	3	0
- Di pupuk, kurang dari dosis anjuran	3	3	1,8
- Di pupuk, sesuai anjuran	5	3	3
c. SOP Pemupukan Pengendalian Hama, Penyakit dan Gulma (HPG)			
a Tidak ada SOP dan pencatatan	0	2	0
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	2	0,8
c Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	2	1,2
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	2	2
d. Pengendalian Hama dan Penyakit			
- Tidak menggunakan sistem monitoring	0	3	0
- Menggunakan sistem monitoring	3	3	1,8
- Menggunakan sistem monitoring oleh regu khusus	5	3	3
e. SOP Pengendalian Gulma			
a Tidak ada SOP dan pencatatan	0	2	
b Ada SOP namun tidak ada pencatatan dan evaluasi	2	2	

PENILAIAN JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
c Ada SOP dan pencatatan namun tidak ada evaluasi	3	2	
d Ada SOP, pencatatan dan evaluasi secara berkala	5	2	
f. Teknologi Pengendalian Gulma (TPG)			
- Tidak pernah dikendalikan	0	3	0
- Menggunakan Pestisida Kimia saja	3	3	1,8
- Menggunakan gabungan beberapa teknik (Kultur Teknis, Mekanis & Musuh Alami)	5	3	3
SKORE II		20	
3. ASPEK SOSIAL, PENGABDIAN DAN LINGKUNGAN			
1. ASPEK SOSIAL			
1. Jaminan Sosial			
1. Pengupahan / Bonus			
- Tidak sesuai peraturan	1	2,5	0,5
- Sesuai aturan Perusahaan	3	2,5	1,5
- Sesuai aturan Pemda	5	2,5	2,5
2. Keselamatan Kerja			
- Tidak dilaksanakan	0	2,5	0
- Dilaksanakan, tidak sesuai peraturan	1	2,5	0,5
- Dilaksanakan, tetapi kadang-kadang	3	2,5	1,5
- Dilaksanakan, sesuai aturan kerja	5	2,5	2,5
2. Fasilitas Sosial Di Lingkungan Kebun			
1. Kesehatan			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, kurang memenuhi syarat	3	2,5	1,5
- Ada, cukup baik	5	2,5	2,5
2. Sekolah			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, kurang memenuhi syarat	1	2,5	0,5
- Ada, cukup baik	3	2,5	1,5
- Ada, sangat baik dan lengkap	5	2,5	2,5
3. Rumah Ibadah			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, kurang memadai	3	2,5	1,5
- Ada, sangat memadai	5	2,5	2,5
4. Olah raga / Hiburan			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, kurang memenuhi syarat	3	2,5	1,5
- Ada, cukup baik	5	2,5	2,5
2. PENGABDIAN PADA MASYARAKAT			
1. Peningkatan Keterampilan dan Latihan			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, tidak sesuai kebutuhan	3	2,5	1,5
- Ada, sesuai kebutuhan	5	2,5	2,5
2. Pembelian, Pemasaran hasil produksi milik masyarakat sekitar			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, tidak kontinyu	3	2,5	1,5
- Ada, kontinyu	5	2,5	2,5
3. Penyediaan bibit / benih unggul / kebun plasma untuk masyarakat			
- Tidak dilakukan	0	2,5	0
- Dilakukan, untuk sebagian desa saja	3	2,5	1,5

PENILAIAN JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
- Dilakukan, untuk seluruh desa sekitar	5	2,5	2,5
4. Pembangunan sarana jalan			
- Tidak dilakukan	0	2,5	0
- Dilakukan	5	2,5	2,5
5. Pembangunan sarana pendidikan			
- Tidak dilakukan	0	2,5	0
- Dilakukan	5	2,5	2,5
6. Pembangunan Sarana Ibadah			
- Tidak dilakukan	0	2,5	0
- Dilakukan	5	2,5	2,5
7. Pemberian Beasiswa			
- Tidak dilaksanakan	0	2,5	0
- Dilaksanakan	5	2,5	2,5
8. Penggunaan tenaga kerja lokal			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, kurang dari 10 %	3	2,5	1,5
- Ada, lebih dari 10 %	5	2,5	2,5
3. LINGKUNGAN			
1. Organisasi khusus pemantauan IPAL			
- Tidak ada	0	3	0
- Ada, kurang mencukupi	3	3	1,8
- Ada, mencukupi, dilakukan secara rutin	5	3	3
2. Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)			
- Belum dibuat / belum ada	0	3	0
- Ada, tetapi tidak mampu mengolah semua volume limbah	1	3	0,6
- Ada, mampu mengolah semua volume limbah	3	3	1,8
- Ada, menggunakan Land Aplication System mampu mengolah semua volume limbah	5	3	3
3. Dokumen AMDAL			
- Tidak ada	0	3	0
- Ada	5	3	3
4. Konservasi tanah dan air			
1. **Terasiring**			
- Tidak dibuat	0	2,5	0
- Dibuat	3	2,5	1,5
- Dibuat dan ditanami LCC	5	2,5	2,5
2. **Penganekaragaman Tanaman**			
- Tidak dilakukan	0	2,5	0
- Dilakukan	5	2,5	2,5
5. Pengendalian Kebakaran			
1. **Petugas Khusus**			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada	5	2,5	2,5
2. **Peralatan Pengendalian**			
- Tidak ada	0	2,5	0
- Ada, manual	3	2,5	1,5
- Ada, mekanis dan manual	5	2,5	2,5
3. **Pemantauan**			
- Tidak dilaksanakan	0	2	0
- Dilaksanakan, tidak rutin	3	2	1,2
- Dilaksanakan, rutin	5	2	2

PENILAIAN JENIS KEGIATAN	NILAI	BOBOT	SKOR
4. **Embung Air**			
- Tidak ada	0	2	**0**
- Ada, tidak mencukupi	3	2	**1,2**
- Ada, mencukupi	5	2	**2**
6. **Identifikasi dan Alokasi Kawasan HCVF (Hutan Bernilai Konservasi Tinggi)**			
a Telah dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF	5	2	**2**
b Belum dilakukan identifkasi dan alokasi kawasan HCVF	0	2	**0**
SKORE III		60	
TOTAL SKORE			
PERINGKAT			

KRITERIA

EMAS : Total nilai 91-100 (SANGAT BAIK)

HIJAU : Total nilai 71-90 (BAIK)

BIRU : Total nilai 41-70 (SEDANG)

MERAH : Total nilai 21-40 (JELEK)

HITAM : Total nilai 0 - 20 (SANGAT JELEK)

SKORING PENILAIAN

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT (%)	SCORE TERTINGGI	KRITERIA PENILAIAN
1.	ASPEK MANAJEMEN	20	20	SANGAT BAIK : 91 - 100 BAIK : 71 - 90 SEDANG : 41 - 70 JELEK : 21 - 40 SANGAT JELEK : 0 - 20
2.	ASPEK PELAKSANAAN	20	20	
3.	ASPEK SOSIAL & LINGKUNGAN	60	60	
	JUMLAH	**100**	**100**	

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK

H. TUPARMAN	KEPALA BAPEDALDA
H. SOFYAN HELMI	KABO HUKUM
H. AMBRANEYAH MUKHIB	PLH - ASS. I
H. SYAIFUL TETENG	SEKDA
H. FARID WADDDY	WAGUB

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 01 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENILAIAN PROGRAM PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH / IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI / IUPHHK - HT) DAN PERKEBUNAN TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

KRITERIA PERINGKAT KINERJA PERUSAHAAN (PROPER) HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK), HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI/IUPHHK-HT) DAN PERKEBUNAN

I. PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN (HPH/IUPHHK) :

NO	KRITERIA PERINGKAT	KATEGORI PENILAIAN	SKORE
1.	PERINGKAT EMAS	SANGAT BAIK	91 - 100
2.	PERINGKAT HIJAU	BAIK	71 - 90
3.	PERINGKAT BIRU	SEDANG	41 - 70
4.	PERINGKAT MERAH	JELEK	21 - 40
5.	PERINGKAT HITAM	SANGAT JELEK	0 - 20

II. PERUSAHAAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI (HPHTI/IUPHHK-HT) :

NO	KRITERIA PERINGKAT	KATEGORI PENILAIAN	SKORE
1.	PERINGKAT EMAS	SANGAT BAIK	91 - 100
2.	PERINGKAT HIJAU	BAIK	71 - 90
3.	PERINGKAT BIRU	SEDANG	41 - 70
4.	PERINGKAT MERAH	JELEK	21 - 40
5.	PERINGKAT HITAM	SANGAT JELEK	0 - 20

PERUSAHAAN PERKEBUNAN :

NO	KRITERIA PERINGKAT	KATEGORI PENILAIAN	SKORE
1.	PERINGKAT EMAS	SANGAT BAIK	91 - 100
2.	PERINGKAT HIJAU	BAIK	71 - 90
3.	PERINGKAT BIRU	SEDANG	41 - 70
4.	PERINGKAT MERAH	JELEK	21 - 40
5.	PERINGKAT HITAM	SANGAT JELEK	0 - 20

Samarinda, 15 Januari 2009

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

H. AWANG FAROEK ISHAK